

West Java Field Studies

**Badan yang berbeda, Mesin yang Sama:
Perspektif Populer Bandung dan Yogyakarta terhadap
Kelangsungan Hidup Orde Baru di Masa Reformasi.**



Aamir S Kadir

**Australian Consortium for In-Country Indonesian
Studies (ACICIS)**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Katolik Parahyangan, Bandung**

January - June 2015

Halaman Pengesahan

Badan yang berbeda, Mesin yang Sama: Perspektif Populer Bandung dan Yogyakarta terhadap Kelangsungan Hidup Orde Baru di Masa Reformasi.

Oleh
Aamir S Kadir
NIM: 2014331236

Aamir S Kadir
(Penulis)

Tanggal: __/__/__

Dr. Bob Sugeng
Hadiwinata., Ph.D
(Supervisor)

Dr. Mangadar
Situmorang., Ph.D.
(Dean of Fisip)

Elena Williams
(Resident Director)
ACICIS

Tanggal: __/__/__

Abstract

The title of this paper “*Different Body but Same Engine: Popular Perspectives on the Continuation of the New Order in the Period of Reformation,*” is to demonstrate that although reformations have taken place, both big and small, a legacy remains in Indonesian politics and society which functions with the same elitism of the New Order system. This paper with research from both Bandung and Yogyakarta will shed an insight into cases which reflect a stall in *reformasi* and understandings from popular perspectives on cases of democracy interlinked with freedoms and corruption interlinked with society in general, as well as engaging with theory and literature which focuses upon New Order politics and *reformasi*. Acknowledging that this subject is extremely wide, and due to constraints, this paper will primarily focus upon the popular perspectives by carrying out primary research in Bandung and Yogyakarta from a targeted range of participants, which includes students, elder members of society, civil organisations and pressure groups, while also consulting those with experience in the field.

Chapter One of the study will begin by clarifying the aims and objectives, guiding questions, literature review and definition of key terms of this research. It will then be followed by a discussion of the constraints of this study. A theory and a historicisation of practice under the New Order system, which will be discussed in order to introduce and outline the role and depth in which it embedded a certain way of practicing politics and encouraged the emergence of a culture of corruption. The study will then outline the methodology behind collating research in the field, and the process of analysing research.

Following this in Chapter Two, the focus will be upon democracy and freedom. Under the section Democracy and Freedom there will be an observation of how Indonesia

has been shown to progress in this field. Within this framework the discussion will observe factors which act as a hindrance to democracy and freedom, through examining the cases of paramilitary organisations, specifically Pemuda Pancasila, and by examining the issue of elitism within the system. Both of these cases will incorporate data and opinions collected from Bandung and Yogyakarta.

Chapter Three, highlights corruption and society, beginning with a consideration for the differences between corruption under the New Order and contemporary Indonesia, whilst acknowledging the difficulties in doing so. It will then examine popular perspectives on Indonesia's corruption ranking in the world, followed by providing and analysing public opinion the issue of contemporary corruption. Chapter Two and Three, therefore, focus upon cases which look at the evolution of practice of the New Order cultural politics under the banner of *reformasi* from specifically Bandung and Yogyakarta. In each examined section there will be input from participants of the field research which will contribute to a variety of popular opinions on the state of *reformasi*.

The engagement of field research demonstrates that Indonesia's *reformasi* is currently viewed with a mixture of opinions, while the New Order is viewed with a mixture of negativity, nostalgia and scepticism. Popular perspectives from Bandung and Yogyakarta will reveal that *reformasi* is at a stage of appearing and feeling somewhat different to that of the New Order, while at the barebones there remains many concerns which stem from the New Order system. This thesis argues that in the era of *reformasi* there still contains a cultural driving force which resembles the elitism of the New Order. The study concludes that there is a mixed proportion of acknowledgement and public awareness that New Order fashioned elitism is still a major issue, a hangover upon democracy and freedoms, and that it holds a lasting legacy upon corruption and society.

Abstrak

Judul penelitian ini "*Badan yang berbeda, Mesin yang sama: Perspektif Populer tentang Kelangsungan Hidup Order Baru di Masa Reformasi,*" adalah untuk menunjukkan bahwa, walau beberapa bentuk reformasi sudah melakukan di bentuk besar dan kecil, masih ada kedalaman di politik Indonesia dan masyarakat, yaitu sebagai elitism yang melanjutkan hidup sejak masa Orde Baru. Penelitian ini dengan kasus-kasus dan studi dari Bandung dan Yogyakarta akan memberikan wawasan kepada kasus-kasus yang merefleksikan kemogokan reformasi dan kepada perspektif-perspektif populer yang berhubungan dengan demokrasi dan kebebasan, dan korupsi dan masyarakat. Teori dan literatur akan disebut dan dibahas dengan fokus kepada Orde Baru dan reformasi. Dikarenakan penelitian ini sangat luas, dan karena kendala, fokus utama penelitian ini kepada perspektif populer untuk mendapat penelitian utama dari Bandung dan Yogyakarta, khususnya dengan mahasiswa, generasi tua, dan ORMAS (organisasi-organisasi masyarakat) sambil konsultasi dengan ahli dalam bidang ini.

Bab Pertama dari penelitian ini akan membuka dengan klarifikasi tujuan studi dan pertanyaan membimbing, tinjauan literatur, pengertian batasan operasional, dan pembatasan masalah. Berikut ini ada dasar teori yang memeriksakan latar belakang masalah, yaitu praktis di bawa system Orde Baru supaya introduksi dan ringkasan peranan Orde Baru dan kedalaman yang itu tertanam sebuah cara yang tetap dalam praktis politik dan didorong budaya korupsi. Lalu penelitian ini akan menjelaskan metodologi dibelakang mengumpulkan data di bidang, yaitu, kenapa, dan berapa analisis dikumpulkan.

Dalam Bab Kedua, penelitian ini akan fokus kepada demokrasi dan kebebasan. Di

bawah bagian Demokrasi dan Kebebasan, akan ada observasi kemajuan Indonesia dalam bidang ini. Dalam kerangka ini, diskusi akan observasi faktor yang bertindak sebagai penghalang kepada demokrasi dan kebebasan, melalui memeriksakan isu-isu organisasi paramiliter, khususnya, Pemuda Pancasila dan memeriksa isu elitism. Kedua kasus ini termasuk data dan analisa dari Bandung dan Yogyakarta.

Bab Tiga memeriksakan korupsi dan masyarakat, dimulai dengan pertimbangan untuk perbedaan korupsi di antara masa Orde Baru dan masa Indonesia kontemporer, sambil mengakui bahwa adalah beberapa kesulitan dalam hal ini. Lalu, penelitian ini akan memeriksa data mengenai tingkat-tingkat korupsi saat ini sambil mengumpulkan dan analisa pendapat masyarakat terhadap isu ini.

Karena itu, Bab Dua dan Tiga lebih fokus kepada kasus-kasus yang menunjukkan bahwa dalam masa reformasi ada aspek yang muncul sebagai praktek politik Orde Baru dan budaya politik di bawah spanduk reformasi. Kasus tersebut merupakan hasil penelitian dari Bandung dan Yogyakarta. Kasus-kasus yang telah diteliti merupakan sebuah partisipasi dari masyarakat Bandung dan Yogyakarta, serta membuat kontribusi ke studi ini secara wacana publik kepada status reformasi.

Proses keterlibatan dalam penelitian utama akan menunjukkan bahwa, reformasi di Indonesia pada masa ini diamati dengan perbedaan pandangan masyarakat, dan masa Orde Baru diamati dengan pemikiran negatif, nostalgia dan skeptis. Perspektif populer Bandung dan Yogyakarta akan mengungkap bahwa reformasi adalah situasi yang terlihat dan terasa berbeda dengan masa Orde Baru, sedangkan dalam situasi yang nyata ada beberapa kekhawatiran yang berasal dari masa Orde Baru.

Penelitian ini menegaskan bahwa pada masa *reformasi* masih ada kekuatan budaya politik yang menyerupai elitism pada masa Orde Baru. Penelitian ini akan menyimpulkan

adanya kesadaran dari bagian masyarakat bahwa elitisme masih sebuah masalah besar, yaitu menghantui demokrasi dan kebebasan serta memiliki warisan yang bertahan lama kepada situasi korupsi dan masyarakat.

Kata Pengantar

Pertama saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Universitas Katolik Parahyangan dan pembimbing saya Mas Bob, yang sangat bijaksana tentang masa Orde Baru dan Staf International Office untuk membantu saya.

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada tim ACICIS, Resident Director Elena Williams, Mita dan Linda yang membantu dengan motivasi, informasi lengkap dan kehidupan di Bandung.

Ketiga saya ingin mengucapkan terimakasih kepada SOAS, University of London, khususya kepada Dr Ben Murtagh dan Din Sani dari fakultas Budaya dan Bahasa Asia Tenggara untuk mengajar saya Bahasa Indonesia.

Juga saya ingin mengucapkan berterimakasih kepada Ani Sartika yang membantu saya dengan mencari, mendapat dan mengurus sumber.

Terimakasih untuk Andre Vltchek yang memberikan waktu dari rencananya di Indonesia untuk berkumpul dan diskusi politik.

Saya ingin mengucapkan berterimakasih kepada organisasi dan semua peserta yang memberikan waktu masing-masing untuk terlibat dalam survei, wawancara dan diskusi.

Akhirnya saya ingin mengucapkan terimakasih kepada warga Sleman dan Gunungkidul Yogyakarta, dan warga Kota Bandung.

Bandung, 2015

Daftar Isi

	Halaman
Cover	I
Halaman Pengesahan	II
Abstract	III-IV
Abstrak	V-VII
Kata Pengantar	VIII
I. Pendahuluan	11
1.1 <i>Tujuan Studi</i>	12
1.1.1 <i>Rumusan Masalah</i>	13
1.2 <i>Tinjauan Pustaka</i>	13
1.3 <i>Batasan Operasional</i>	14-17
1.4 <i>Pembatasan Masalah</i>	17
1.5 <i>Latar Belakang Masalah</i>	18
1.5.1 <i>Dasar-dasar Sistem Orde Baru</i>	18
1.5.2 <i>Korupsi dan efek kepada Masyarakat di Bawah</i> <i>Sistem Orde Baru</i>	19
1.5.3 <i>Reformasi dan Masa Reformasi</i>	20
1.6 <i>Metodologi Penelitian</i>	22
1.7 <i>Jadwal Penelitian</i>	26

II. Demokrasi dan Kebebasan

2.1 Evolusi Reformasi: Apa Reformasi Belum Selesai?.....	27
2.2 Penghambat Kebebasan Politik: Kasus Pemuda Pancasila.....	30
2.3 Elitisme dan Demokrasi	35
2.3.1 Kesimpulan	39

III. Korupsi Pada Masa Orde Baru dan Sekarang

3.1 Evolusi Korupsi dan efek Masyarakat.....	43
3.1.1 Kesimpulan.....	49

IV. Kesimpulan.....50

4.1 Implikasi.....	52
--------------------	----

V. Daftar Pustaka

5.1.1 Buku-Buku.....	53
5.1.2 Jurnal-Jurnal.....	53
5.1.3 Online.....	54
5.1.4 Sumber.....	55
5.1.5 Lain.....	56

I. Pendahuluan

Dengan reformasi Indonesia baru yang demokratis muncul dan adanya transformasi politik, hal ini sering disebut di berbagai media dan review singkat terhadap topik reformasi. Meskipun demikian, sistem Orde Baru yang diatur Indonesia, bisa dilihat sebagai peninggalan warisan yang menjadi kebiasaan dalam budaya praktis politik, yang bisa ditemukan di Indonesia kontemporer. Dengan menganggap kekuasaan Suharto sebagai rezim; sebuah rezim menyiratkan ide yang luas tentang berhubungan politik dan ekonomik, lebih spesifik, itu tentang bagaimana kekuasaan harus diatur di masyarakat.¹

Perubahan rezim menunjukkan bahwa mengganti pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan persoalan, yaitu dengan berharap bahwa persoalan yang pemerintah yang tidak dapat disetujui lagi, diganti sistem baru yang akan mencapai kondisi yang bisa menyelesaikan masalah.

Walau, di Indonesia saat ini ada sejumlah besar orang yang dikecewakan dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari reformasi, khususnya dikarenakan oleh elitisme dan korupsi kelihatan tetap tinggi. Karena topik ini sangat luas, maka penelitian ini akan menyempitkan fokus kepada demokrasi dan kebebasan, korupsi dan masyarakat, semuanya berhubungan dengan tema warisan dari masa Orde Baru.

¹ Catatan Kuliah: Perubahan Rezim. SOAS. Mark Laffey, 2012

1.1 Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah untuk menunjukkan beberapa kesamaan di antara masa Orde Baru dan masa ini, yaitu bergabung dengan faktor demokrasi dan kebebasan, dan korupsi dan sosial. Dengan demokrasi dan kebebasan, studi ini ada fokus bukan kepada proses demokrasi atau prakteknya, tetapi kepada elitisme dalam peran perwakilan rakyat, dan untuk kebebasan, yaitu bentuk-bentuk yang menghindari kebebasan politik atau hak sipil. Dengan korupsi dan sosial, studi ini akan fokus kepada kasus korupsi dari atas ke bawah, yaitu termasuk sosial.

Selain itu, studi ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif populer tentang masa lalu (Orde Baru) dan masa sekarang (Masa Reformasi), dan juga pemikiran terhadap beberapa kasus yang dipilih. Riset dalam studi ini akan fokus kepada kota Bandung dan lingkungan yang segera sekitarnya dan Yogyakarta, dengan beberapa kasus yang bergabung dengan persoalan demokrasi dan kebebasan dan korupsi dan aspek sosial.

1. Dengan faktor demokrasi dan kebebasan, ada bentuk mengurangi kebebasan demokratis, yaitu hak demokratis dengan kasus yang riset dari Pemuda Pancasila, Yogyakarta. Sedangkan di Bandung demokrasi ada observasi bahwa pemimpin politik dan yang sering mewakilkan rakyat adalah dari keluarga elit.
2. Dengan korupsi dan sosial (masyarakat), studi ini membandingkan masa Orde Baru dengan masa reformasi untuk menilai perbedaan, dan dengan hasilnya ini ingin menyelidiki perspektif populer tentang status korupsi Indonesia pada masa itu dan pada masa ini.

3. Terhadap kasus-kasus tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan, mengumpulkan, serta menganalisis kasus dengan perspektif populer dari masyarakat di Bandung dan Yogyakarta.

Dari hasil penelitian kasus-kasus tersebut, akan ada kontribusi pemikiran publik dan referensi kepada teori penulis di bidang ini.

1.1.1 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ingin memeriksakan adalah:

1. Apa warisan Orde Baru masih bisa terasa oleh masyarakat Bandung dan Yogyakarta di bidang demokrasi dan kebebasan dan korupsi dan sosial?
2. Maka bagaimana pemikiran masyarakat Bandung dan Yogyakarta terhadap reformasi dan kasus diperiksakan? Yaitu lewat beberapa macam bentuk perspektif populer, misalnya survei, diskusi, music, seni dan media lainnya.

1.2 Tinjauan Pustaka

Berikut ini merupakan beberapa tinjauan pustaka para ahli yang mendukung penelitian pada studi ini.

- I. Benedict Anderson dengan tulisan "*Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective*" ada kontribusi tentang perbedaan antara zaman Belanda, Sukarno dan sistem Orde Baru di bawah Suharto, ini sangat menarik untuk memperkembang ide-ide tentang fungsi dan dasar-dasar sistem Orde Baru dan pemimpinnya. Walau, argumen Anderson lebih fokus kepada dinamika sebagai negara-bangsa, daripada memeriksa aspek aspek pemerintahan Orde Baru lebih dalam.
- II. Dalam bidang riset di masa kontemporer, Andre Vltchek (2012) dengan '*Indonesia: Archipelago of Fear*' ada kontribusi yang sangat menarik karena termasuk di buku ini adalah sejarah Indonesia dan kasus-kasus kontemporer di politik dan masyarakat Indonesia. Tulisan Andre Vltchek memeriksa demokrasi, kebebasan dan korupsi, walaupun, riset dalam buku ini tidak ada

fokus kepada salah satu kota, dan tidak ada kontribusi perspektif populer, ternyata lebih seperti review singkat.

- III. Untuk pembahasan korupsi, tulisan Snape sebagai kerangka teori menarik karena itu menetapkan faktor politik, ekonomik dan budaya untuk memeriksa alasan korupsi berkembang di masa Orde Baru. Tulisan Snape juga menyebutkan beberapa cara untuk menghilangkan korupsi dalam sistem Indonesia baru, yaitu reformasi. Tetapi salah satu hal yang bertindak sebagai suatu kelemahan adalah bahwa tulisan Snape ditulis pada tahun 1999, yaitu pada saat reformasi baru mulai, dan tulisan Snape pada saat itu penuh dengan harapan dan optimisme kepada proses reformasi dan sebagai akibat kehilangan korupsi.
- IV. Kontribusi Leo Suryadinata tentang transformasi masa Orde Baru ke masa reformasi berwawasan karena menghadapi alasan ekonomik dan politik untuk jatuhnya Suharto. Tulisannya juga memeriksakan perubahan segera setelah Suharto diturunkan dan analisa kelanjutan Orde Baru. Salah satu kekurangan adalah bahwa analisa kelanjutan Orde Baru dalam tulisan ini tidak bisa ekstensif karena tulisan ini mengeluarkan pada tahun 1999.

1.3 Batasan operasional

Agar penelitian ini lebih jelas, maka ada beberapa kata kunci yang memerlukan klarifikasi. Supaya kata-kata tersebut bisa dipahami dalam konteks penelitian ini.

“Demokrasi” tidak hanya tentang kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum, karena “pemilihan umum sendiri tidak tentukan demokrasi.”² Tetapi ada kerangka yang lebih luas dari fungsi keterlibatan masyarakat dan hak sipil.

“Elitisme” dalam konteks studi ini, menghubungkan dengan praktek politik yang tertanam dalam kelompok-kelompok elit. Pada umum, kata elit berhubungan dengan

² Newberg, P.R, and Carothers, T., 1996. Aiding – and Defining Democracy. In *World Policy Journal*. [e-journal] Available through: JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/40209465> [Accessed 19/03/2015]. p.97

konsentrasi kekuasaan, kekayaan dan pengaruh dalam sekelompok atau beberapa kelompok.³

“Kebebasan” dalam konteks politik adalah sangat luas. Tetapi menurut Gaetano Salvemini, ada tiga macam hal yang membuat rezim yang bebas, tetapi dua hal dari tiga ini akan tersebut. Pertama adalah *‘personal rights’* (hak pribadi) yang termasuk kebebasan pemikiran, agama, pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua adalah hak politik yang termasuk kebebasan untuk ekspresi opini, mengikut organisasi politik atau partai politik, kemampuan untuk berkumpul dan demonstrasi dan pers yang bebas.⁴ Penelitian ini akan mempertimbangkan kebebasan dengan kerangka kedua hal yang tersebut sebagai kata operasional yang luas. Tetapi penelitian ini lebih fokus kepada kemampuan masyarakat ekspresi hak sipil dan politik, dan dalam penelitian ini akan fokus kepada kebebasan hak sipil.

“Korupsi” menurut *Transparency International* (2015), korupsi adalah “penyalahgunaan kekuasaan dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Itu ada pengaruh kepada semua orang yang mempercayai kepada keutuhan yang mewakilkan mereka. Yaitu, tidak hanya keuntungan finansial, tetapi tidak finansial juga.”⁵ Korupsi ada beberapa bentuk yang bisa di analisa seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan dan pengadaan barang dan jasa. Korupsi di Indonesia sering disebut dengan abreviasi *KKN* (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).⁶ Maka korupsi di penelitian ini

³ Definisi 1.1. Oxford Dictionaries. [online]. <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/elite> [Accessed 02/02/2015]

⁴ Salvemini, G., 1935. What is Freedom? In *Annals of the American Academy of Political Science*, [e-journal] vol. 180, JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/1019175> [Accessed 20/03/2015] p.1

⁵ Transparency International., 2015. http://www.transparency.org/whatwedo?gclid=CKGslby7_sQCFRUXigodHawAvQ [Accessed 20/03/2015]

⁶ Indonesia-Investments. 2015 <http://www.indonesia-investments.com/business/risks/corruption/item235>

menganggap penyalahgunaan kekuasaan, penyuaipan yang termasuk *KKN* sebagai kerangka untuk diskusi korupsi.

“Perspektif populer” atau opini publik adalah satu istilah yang menarik beberapa macam opini. Misalnya, menurut salah satu pernyataan terkenal dari Winston Churchill (perdana menteri Inggris 1940-45 dan 1951-55, partai Konservatif)⁷ adalah; “tidak ada hal seperti opini public.” Ini sangat berbeda dengan pendapat Abraham Lincoln yang pada soal ini adalah bahwa “opini publik adalah semuanya [untuk negeri ini].”⁸ Penelitian ini menganggap opini publik sebagai hal yang penting. Dengan “perspektif populer” penelitian ini tidak hanya memeriksa opini public tetapi mengakui bahwa perspektif populer tidak bisa dianggap melalui salah satu modus, walau perspektif populer adalah mengumpulkan ekspresi opini, yaitu lewat beberapa macam bentuk yang termasuk survei, diskusi, seni, musik dan bentuk lainnya.

“Reformasi” memiliki beberapa definisi yang berbeda, demikian pula adalah beberapa macam ide-ide pada artinya reformasi dan praktisnya. Misalnya Rieffel menyebutkan reformasi sebagai “sebuah transformasi demokratis.”⁹ Transformasi demokratis yang dimaksud, adalah sebuah proses yang tidak terjadi tiba-tiba seperti revolusi. Reformasi berbeda dengan revolusi karena prosesnya tidak secepat revolusi dan seringkali tetapi tidak selalu, proses transformasi demokratis (reformasi) terisi dengan proses lebih damai. Walau, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan

⁷ Draper, B and Brown, J., 2015. Gov.UK. <https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/winston-churchill> [Accessed 21/03/2015]

⁸ Hobley, M., 2012. Public Opinion can make a Positive Role in Policy Making. The Guardian. [website] <http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2012/sep/03/public-opinion-influence-policy> [Accessed 21/03/2015]

⁹ Rieffel, L., 2004. Indonesia's Quiet Revolution. In *Foreign Affairs*. [e-journal] p.98

reformasi sebagai sebuah proses yang berbeda dengan revolusi, tetapi dengan tujuan untuk merubah sistem sebelumnya, dengan sistem yang lebih baik atau yang lainnya.

“Sosial” dalam konteks penelitian ini berarti efek korupsi pada dan dalam masyarakat, yaitu tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat yang memiliki pengaruh pada hidup masyarakat setiap hari

1.4 Pembatasan Masalah

Tanpa memberikan ringkasan, Bandung dan Yogyakarta dihuni oleh sejumlah besar orang. Jadi, untuk mendapatkan perspektif populer, yang jelas “mewakikan” pemikiran Bandung atau Yogyakarta, sangat sulit, karena semua orang tidak bisa diwawancara oleh saya sendiri. Walau, saya mendapat beberapa cara untuk mencoba untuk dapat pemikiran yang luas, lewat wawancara orang dari keadaan yang berbeda, dari perdesaan dan perkotaan.

Salah satu hal yang membuat penelitian ini sangat sulit adalah waktu. Waktu untuk wawancara orang dan membuat hubungan dengan orang tidak cukup lama untuk memberikan hasil yang bisa lebih baik, yaitu dalam kualitas mengumpulkan data. Untuk mendapat waktu dengan orang dari organisasi pemerintah juga sulit karena proses kadang-kadang bisa lambat dan jadwal selalu berubah. Satu tantangan lagi adalah bahwa sejumlah besar orang yang saya ingin mendapatkan perspektif dari tidak sadar tentang politik atau tidak terlalu peduli tentang politik Indonesia. Namun ini menunjukkan salah satu temuan sendiri.

Terakhir hal adalah bahwa saya mengakui subjek ini sangat luas, dan memerlukan sebuah penelitian lebih lengkap dan lebih lanjut. Oleh karena itu, tujuan diharapkan adalah

fokus kepada mengumpulkan dan analisa perspektif populer terhadap aspek-aspek dari demokrasi dan kebebasan dan korupsi berhubungan dengan masyarakat.

1.5 Latar Belakang Masalah

1.5.1 Dasar-dasar Sistem Orde Baru

Sistem lama Sukarno sebetulnya sudah selesai pada terakhir tahun 1965 dan lebih jelas pada tahun 1966, walau, menurut Ricklefs “transisi dari Orde Lama ke Orde Baru jelas didirikan oleh Suharto pada tahun 1969.”¹⁰ Suharto yang mengambil kontrol TNI, membuat gerakan yang cepat untuk ‘menamankan’ situasi di Indonesia.

Sebuah fakta yang penting adalah bahwa Orde Baru didirikan dengan beberapa penipuan sebagai didiskusikan oleh Benedict Anderson dan Saskia Wieringa. Salah satu penipuan adalah tentang kebohongan autopsi jenderal pada peristiwa G30S (Gerakan 30 September). Menurut versi resmi, anggota dari *Gerwani* (Gerakan Wanita) terlibat dalam proses menghinakan dan memutilasi jenderal-jenderal yang diculik. Walau, “autopsi asli yang Suharto pasti ada akses untuk melihat, menunjukkan bahwa tidak ada yang mutilasi di badan korban Jenderal.”¹¹ Ini penting karena itu ada tanda-tanda penipuan, dan informasi palsu pada dasar sistem Orde Baru.

Di tulisan Anderson, ada beberapa ide-ide yang menunjuk karakter Suharto, yaitu bahwa Suharto dari kecil adalah seorang yang oportunis, dan menggunakan aparat Negara untuk memajukan. Misalnya, di bawah KNIL (Tentara Kolonial Belanda), di bawah Jepang pada masa okupasi dan nantinya setelah Jepang menyerah, dia

¹⁰ Ricklefs, M.C., 1993. *A History of Modern Indonesia Since c.1300*. California: Stanford University Press. p.297.

¹¹ Wieringa, S., 2003. *The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism*. [e-journal] vol. 15, No. 1. Project MUSE: [Accessed 05/01/2015]. p.79

pindah ke Tentara Republik Indonesia dan memaju lagi. Dari peran dalam KOSTRAD Suharto berhasil mendapat kesempatan untuk naik dan jadi Presiden sebagai hasilnya mengakhiri G30S.

Wieringa juga menyebutkan bahwa Suharto oportunist; "Suharto menunjukkan diri bahwa dia kejam dan sangat ambisius dan pula bisa menunggu dengan sabar untuk kesempatan untuk serangan."¹²

Sistem Orde Baru pada dasarnya ada beberapa tujuan, yaitu, mengamankan situasi di Indonesia dan fokus kepada pembangunan ekonomi. Sebagai hasilnya, demokrasi dan hak sipil selama Orde Baru dikontrol ketat oleh pemerintah Orde Baru. Menurut penilaian *Freedom House* untuk tahun 1973 sampai 1993 Indonesia dinilai sebagai "Partly Free" (sebagian bebas), dengan nilai untuk *Political Rights* (Hak Politik) sering 5 dan 6 dan *Civil Liberties* (Hak Sipil) kadang 5 dan kadang 6 (nilai 1 terbaik dan 7 terburuk menurut *Freedom House*). Setelah 1993 dan sampai 1999, situasi politik di Indonesia dinilai sebagai "Not Free" (tidak bebas).¹³ Penilaian di antara tahun 1968-73 tidak ada di database *Freedom House*.

1.5.2 Korupsi dan efek kepada Masyarakat di Bawah Sistem Orde Baru

Menurut Pramoedya Ananta Toer dalam wawancara Andre Vltchek, "korupsi di bawah sistem Orde Lama Sukarno ada pada tingkat yang kecil, sedangkan di masa Suharto, Indonesia menghilangkan rasa bangsa sendiri dan Suharto dan anaknya sendiri menjadi orang yang terkorup di Indonesia."¹⁴ Pada masa Orde Baru korupsi dengan jelas naik dan korupsi menjadi dua tingkat, yaitu di antara elit-elit dan di masyarakat. Seperti dijelaskan di

¹² Ibid. p.77

¹³ Freedom House (2015). Individual Country Ratings and Status 1973-2015. <https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.VT9Sf5NKWVw> [Accessed 20/02/2015]

¹⁴ Vltchek, A., and Indira, R., 2006. *Exile: In conversation with Pramoedya Ananta Toer*. Ed Nagesh Rao. Chicago: Haymarket Books. p. 126

tulisan Vltchek, “di Indonesia korupsi berevolusi untuk lebih dari 30 tahun selama Orde Baru dan tidak hanya sistem tetapi menjadi budaya.”¹⁵

Budaya korupsi juga masuk ke hidup orang setiap hari di masa Orde Baru, sebagai dijelaskan oleh Snape:

“Korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pegawai gaji resmi yang rendah tetapi juga oleh keperluan Presiden untuk menamankan posisinya dengan memungkinkan tokoh utama di birokrasi dan militer untuk memanfaatkan dengan hadiah ekonomik untuk loyalitas mereka. Korupsi simptomatis dengan penyebab lain, dan kesempatan untuk korupsi pada tingkat yang sangat besar muncul dalam spesifik kondisi politik dan ekonomik.”¹⁶

1.5.3 Gerakan Reformasi dan Masa Reformasi

Dalam peristiwa-peristiwa sebelum Suharto berhenti jadi Presiden, ada gerakan-gerakan reformasi yang sudah mulai muncul karena kecewa dengan berbagai alasan situasi politik, ekonomi dan sosial di Indonesia. Suharto berhenti menjadi Presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998.¹⁷ Pada peristiwa yang menjadi di minggu-minggu dan hari-hari sebelum Suharto diturunkan, ada beberapa bentuk alasan dalam gerakan reformasi, ada yang panggil untuk mengakhiri KKN.¹⁸ Ada juga beberapa bentuk pendapat tentang alasan Suharto diturunkan. Sebagai contoh, menurut penjelasan Suryadinata, pada saat itu elit merasa waktu sudah cukup dan tidak bisa mendukung Suharto lagi, ini ditunjukkan dengan aksi “Jendral Wiranto tidak dukung Suharto dengan tegas lagi dan bahwa kabinet minta dia menggundurkan

¹⁵ Vltchek, A., 2012. *Indonesia: Archipelago of Fear*. London: Pluto Press. p.149

¹⁶ Snape, F., 1999. Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia. In *Third World Quarterly* [e-journal] vol. p.590

¹⁷ Vltchek, A., 2012. *Indonesia: Archipelago of Fear*. London: Pluto Press. p.39

¹⁸ Snape, F., 1999. Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia. [e-journal] Vol 20. No. 3, *Third World Quarterly*. JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/3993323> [Accessed 23/02/2015] p. 589

diri.”¹⁹ Pendukung internasional untuk Suharto juga dicabut, paling jelas adalah pendukung dari Amerika Serikat, yang sejak dulu Suharto mendapat dukungan dari.²⁰ Tulisan Suryadinata menjelaskan bahwa ada tiga faktor penting yang membuat Suharto turun menjadi Presiden. Berikut ada tiga faktor ini;

*“Pertama adalah militer tidak mendukung dia lagi, khususnya karena Jendral Wiranto tidak mendukung dia lagi. [...] Kedua, adalah karena Harmoko dan anggota kabinet meminta dia mengundurkan diri. Ketiga adalah karena pada 20 Mei, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madelene Albright dengan cara terbuka menyatakan bahwa administrasi Clinton ingin Suharto mengundurkan diri.”*²¹

Dari faktor-faktor ini, yang jelas adalah bahwa elit tidak siap untuk mendukung Suharto dan pendukung internasional juga dicabut.

Setelah Presiden Suharto berhenti menjadi Presiden Indonesia, penilain *Freedom House* untuk Indonesia memperbaiki dan menjadi *“Partly Free”* dengan nilai 5 untuk hak politik dan 3 untuk hak sipil (nomor 1 terbaik dan nomor 7 kondisi terburuk).²² Salah satu alasan bahwa nilai transformasi dengan cepat, khususnya hak sipil, adalah karena dibawah B. J. Habibie ada hukum pers Indonesia tahun 1999. Hukum ini terlepas regulasi yang tersedak pers selama waktu Suharto Presiden.²³ Menurut Steele, ini adalah “sebuah perbedaan yang menentukan terhadap masa lalu.”²⁴ Fakta hasil kejatuhan Suharto adalah bahwa itu “membuat perubahan dan kontinuitas. Kebebasan berbicara, kebebasan pers dan

¹⁹ Suryadinata, L., 1999. A Year of Upheaval and Uncertainty: The Fall of Suharto and Rise of Habibie. In *South East Asian Affairs*. JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/27912223> [Accessed 24/02/2015] p.114-155

²⁰ Ibid., p.115

²¹ Ibid., p.114-115

²² Freedom House., 2015.

²³ Steele, J., 2012. The Making of the 1999 Indonesian Press Law. p.1

²⁴ Ibid., p.3

kebebasan organisasi sudah jelas.”²⁵ Meskipun ada perubahan, pada masa reformasi masih ada warisan Orde Baru yang berurat berakar dalam politik Indonesia dan masyarakat. Kontinuitas ini, yang penelitian ini ingin memeriksa.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang ‘*historis*’ (kesejarahan) dan ‘praktis,’ yaitu ‘kesejarahan’ untuk membanding konsep-konsep dari topik Orde Baru dan kontemporer dengan topik masa reformasi dan ‘praktis’ karena keterlibatan mendapat sumber dan analisa sumber.

Pilihan Lokasi

I. Yogyakarta, Jawa Tengah

Saya sudah tinggal di kota Yogyakarta untuk sekitar tujuh bulan sebelum memindah ke kota Bandung, dan dalam waktu itu saya mendapat banyak hubungan dengan teman-teman dari beberapa Universitas (tidak hanya Universitas Gadjah Mada), dosen-dosen, aktivis dan sudah menemukan beberapa ide-ide dari kota itu.

Oleh karena itu, Yogyakarta jelas memuncil sebagai tempat yang riset saya mulai dari. Yogyakarta sebagai ‘kota pelajar’ juga dihuni oleh pendukung mahasiswa-siswi yang cukup besar maupun bermacam suku bangsa Indonesia yang membuat proses riset tambah menarik.

II. Bandung, Jawa Barat

Alasan saya memilih kota Bandung dan lingkungan di segera sekitarnya, adalah karena Jawa Barat sendiri sangat luas dan Bandung di masa ini ada kebangitan semangat di bidang

²⁵ Suryadinata, L., 1999. A Year of Upheaval and Uncertainty: The Fall of Suharto and Rise of Habibie. In *South East Asian Affairs*. JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/27912223> [Accessed 24/02/2015] p.126

politik dengan walikota Ridwan Kamil dan juga peristiwa peringatan konferensi Asia-Afrika. Untuk studi ini saya ingin mendapat pemikiran dari Bandung, Jawa Barat dan kota Yogyakarta, Jawa Tengah, sehingga saya dalam proses analasi bisa memeriksa jika ada perbedaan yang jelas di antara pemikiran di antara kota dua ini.

Dibandingkan dengan Bandung, Yogyakarta tidak sebesar dan tidak seramai sebagai Bandung. Tetapi dua hal yang kedua kota ini ada persamaan adalah bahwa ada daerah-daerah pedesaan dan perkotaan, maupun banyak orang dari luar kota.

Pengolahan dan Pencatatan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu metode mengumpulkan data-data dari sumber yang penilitian utama. Penelitian ini mengunnakan sumber perpustakaan untuk dasar teori dan mendukung metode penelitian ini. Di bawah terdaftar beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat data.

a. Survei

Pertama cara yang digunakan adalah survey. Kelompok yang ditargetkan dengan survei-survei ini adalah mahasiswa-siswi dan orang yang lebih tua dari Yogyakarta dan Bandung, ini adalah karena studi ini ingin mendapat ide-ide dari bagian masyarakat ini untuk membandingkan jika ada perbedaan diantara pemikirannya pada tema reformasi dan Orde Baru. Tambahan lagi, pada saat mencatat data ini, usia orang dan kota berasal juga dipertimbangkan agar data itu bisa dikategorikan dan hasil data bisa dibandingkan untuk analisa. Agar pengkumpulan data lebih akurat, tujuan adalah untuk survey 100 orang, yaitu 50 orang dari Yogyakarta dan 50 orang dari Bandung, supaya data yang dicatat lebih akurat.

b. Wawancara

Kedua cara digunakan untuk mencatat data adalah interview. Proses ini kadang dibuat susah karena kendala waktu dan kesibukan masing-masing orang dari organisasi dan pemerintah. Ini khususnya betul tentang orang yang ada peran yang lebih tinggi dalam organisasi. Untuk wawancara anggota-anggota dari organisasi kadang-kadang mengungkapkan cerita yang lebih menarik dan berwawasan.

c. Diskusi

Ketiga cara digunakan untuk mendapatkan sumber adalah diskusi, yaitu terjadi pada saat berkumpul dengan teman-teman dan orang lain. Diskusi kadang-kadang tidak sengaja membawa tema politik, tetapi saat itu terjadi, sebagai sumber menjadi lebih baik. Itu karena mengumpulkan pemikiran orang yang jujur seringkali lebih mudah, karena suasana diskusi tidak resmi jika dibandingkan dengan survey-survei dan wawancara.

d. Empiris / Observasi

Keempat cara digunakan tidak sengaja sebagai cara mendapat data, tetapi terdapat melalui observasi dan pengalaman hidup di Indonesia.

Potensi Bias

Dengan setiap bentuk studi, ada beberapa hal yang kadang-kadang bisa membuat pengaruh kepada hasil studi, dan hal-hal ini membuat potensi untuk bias. Di bawah terdapat beberapa potensi bias dalam penelitian ini:

- i. Sebagian besar waktu saya untuk penelitian ini adalah di kota Yogyakarta dan saya mendapat lebih sumber, khususnya di bidang diskusi dan observasi dari kota ini. Oleh karena itu, hal ini bisa dianggap sebagai potensi bias, karena pemikiran Yogyakarta bisa ada pengaruh di atas sumber pemikiran dari Bandung.

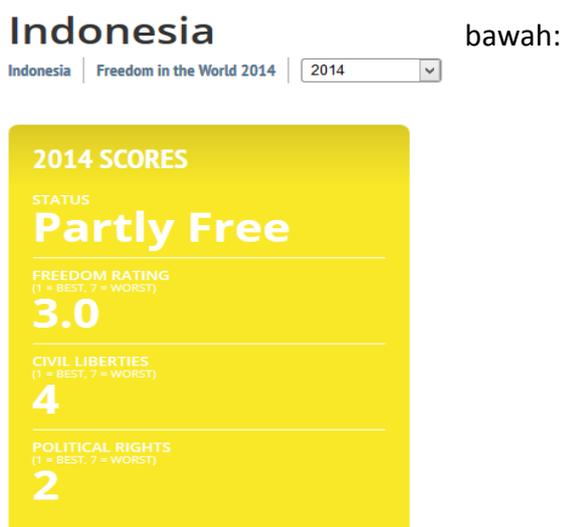
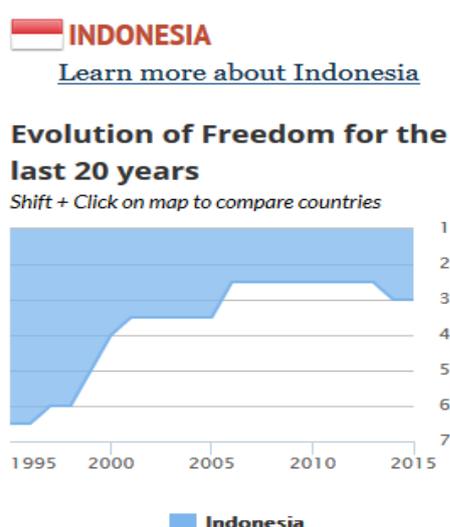
- ii. Dalam proses mengumpulkan data, ada 50 peserta yang disurvei dari Yogyakarta dan 50 peserta yang disurvei di Bandung. Walau yang agak sulit dikontrol adalah jumlah peserta yang usia berbeda, yaitu untuk mengumpulkan data dari jumlah peserta mahasiswa-siswi dan peserta yang usia lebih tua yang sama. Pada hasil data, ini ada kemungkinan pengaruh. Misalnya, jika di Yogyakarta lebih peserta mahasiswa disurvei, sedangkan di Bandung jumlah peserta mahasiswa yang disurvei kurang daripada di Yogyakarta, maka, hasil data bisa menunjukkan pemikiran yang berbeda.
- iii. Ketidakmampuan untuk wawancara anggota-anggota DPR maupun yang sedang pemimpin negara. Ini karena barangkali mereka bisa membagi saran atau opini tentang langkah reformasi yang baik atau buruk dengan sudut pandang lain.
- iv. Di proses wawancara anggota dari organisasi atau partai politik, sebelumnya, pemikiran sendiri barangkali negatif terhadap organisasi itu. Sebagai hasilnya, dalam proses wawancara pertanyaan bisa fokus untuk mencari tahu aspek negatif.

II Demokrasi dan Kebebasan

2.1 Evolusi Reformasi: Apa Reformasi Belum Selesai?

Di masa reformasi, dengan penilaian *Freedom House*, Indonesia setelah Suharto diturunkan membuat kemajuan kebebasan dan demokratis, yaitu sampai tahun 2006. Walau, mulai dari tahun 2006, pada analisa data *Freedom House*, proses memperbaiki tingkat kebebasan setiap tahun terhenti. Lebih jelas lagi adalah sejak tahun 2013, kebebasan di Indonesia turun lagi ke tingkat seperti sebelum 2006.²⁶

Ini ditunjukkan dengan grafik yang di



Nilai didasarkan pada dua peringkat numeric – dari 1 ke 7 – untuk hak politik dan hak penduduk, dengan **1** mewakili yang **paling bebas** dan **7** yang **paling tidak bebas**.

Sebelum masa reformasi bisa dianggap dari pemikiran masyarakat Bandung dan Yogyakarta, maka penelitian ini memerlukan memahami jika menurut masyarakat reformasi itu sebagai proses atau sebuah era sudah selesai atau masih jalan. Seperti dikatakan Pak Iwan seorang penjaga di Bandung, saat saya menanyakan dia tentang masa ini sebagai

²⁶ Freedom House., 2015. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/indonesia#.VV18OEZKWVw>

masih di dalam batas masa reformasi, dia berkata “ini kan demokrasi, demokrasi itu produk reformasi, berarti ini kehidupan dalam masa reformasi.”²⁷

Di saat saya menanyakan peserta di Yogyakarta jika mereka setuju dengan pernyataan ‘*Reformasi Belum Selesai*,’ 40 di antara 50 peserta setuju dengan pernyataan ini, sedangkan 10 peserta menyebutkan ‘*tidak tahu*.’ Hasil ini menyerupai situasi di Bandung yang ada 39 peserta setuju dengan pernyataan, sambil 11 menyatakan ‘*tidak tahu*.’²⁸ Di antara 100 peserta, tidak ada yang memilih tidak setuju dengan pernyataan ‘*Reformasi Belum Selesai*.’ Hasil ini penting karena itu mempertunjukkan bahwa setidaknya 79% peserta yang disurvei dari Yogyakarta dan Bandung menganggap reformasi sebagai proses yang masih jalan, sambil 21% dari kedua kota ini, memilih untuk netral atau tidak tahu.

Tingkat kebebasan selama reformasi naik dan turun jika diturut data dan analisa *Freedom House*, oleh karena itu, pertanyaan jika masyarakat merasa perbedaan selama masa reformasi adalah penting.

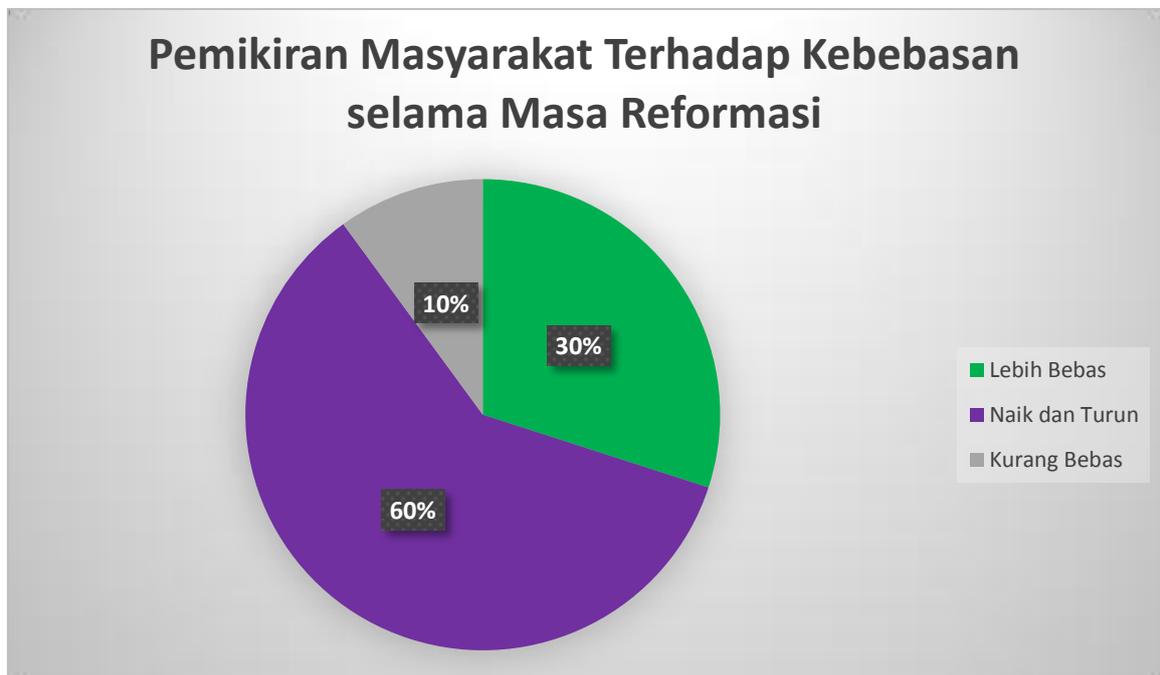
Di antara 100 peserta yang disurvei, 30 peserta (16 dari Yogyakarta dan 14 dari Bandung) memikir situasi kebebasan di Indonesia selama masa reformasi lebih bebas, sambil 60 orang (30 dari Yogyakarta dan 30 dari Bandung) memikir bahwa situasi kebebasan kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun, sedangkan 10 peserta (empat dari Yogyakarta dan enam dari Bandung) memikir bahwa Indonesia kurang bebas.²⁹

²⁷ Diskusi masa reformasi dengan penjaga Pak Iwan, Bandung, 25/03/2015

²⁸ Survei yang dikumpulkan di antara bulan Februari – Mei 2015

²⁹ Jumlah ini didapatkan dari 100 orang yang disurvei dari Yogyakarta dan Bandung, 2015.

Grafik di bawah menunjukkan pemikiran masyarakat terhadap kebebasan selama masa reformasi:



Salah satu peserta yang menjawab '*lebih bebas*' adalah Abriani Ratnasari seorang mahasiswa di Yogyakarta, yang menyebut alasannya untuk memilih jawab ini adalah karena "hukum pers kami lebih bagus daripada dulu, dan hukum itu juga dijaga."³⁰ Saat saya menanyakan beberapa peserta alasan untuk memilih naik dan turun kebanyakan peserta disebut intolerensi, khususnya intolerensi agama dan kebebasan bicara online. Menurut mahasiswa UGM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Nius Pranantha, kebebasan di Indonesia:

"semakin tahun berubah, ada ups and downs, tapi merasa lebih bergerak naik, tapi perubahan tidak signifikan. Yang prihatin saya adalah intoleransi agama, dan

³⁰ Diskusi online setelah survey, 5 April 2015.

ketidakmampuan pemerintah untuk membela minoritas atau agama lain. Itu yang membuat saya merasa kebebasan naik dan turun.”³¹

2.2 Penghambat Kebebasan Politik: Kasus Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila sudah hadir pada tahun 1959 dengan tujuan melawan NASAKOM, tetapi bentuknya yang itu terjadi lebih terkenal dengan adalah sebagai sebuah organisasi paramiliter yang didasarkan pada tahun 1965 selama kontra kudeta. *Pemuda Pancasila* melanjutkan hidup pada tahun 1980 di bawah Yapto Soerjosoemano.³² Alasan untuk ini dijelaskan oleh Loren Ryter sebagai berikut:

*“Kemunculan dan kebangkitan Pemuda Pancasila selama terakhir era Suharto adalah sebuah konsekuensi yang diperlu oleh Orde Baru untuk transformasi karakter pemuda yang setelah kemerdekaan nasionalis dan revolusioner ke nasionalisme yang mengekspresikan melalui negara yang persona sendiri, walau tanpa mengorbankan semangat yang memiliki pemuda.”*³³

Saat gerakan reformasi mulai terjadi, *Pemuda Pancasila* sering terlibat dalam kontra demonstrasi dan melanjutkan mendukung rezim Suharto, yaitu sampai Suharto mengundurkan diri. Oleh karena itu Ryter menyebutkan *Pemuda Pancasila* dalam judul tulisannya sebagai ‘*Terakhir Setia Preman Suharto.*’ Di masa ini, *Pemuda Pancasila* masih ada seperti warisan dari Orde Baru, tetapi perannya dalam masyarakat tidak sejelas yang dulu. Satu hal yang tidak berubah adalah warisan

³¹ Diskusi dengan Nius Pranantha, UGM Yogyakarta. 26/04/2015 15:11

³² Anderson. B.R’O. G., 2001. *Violence and the State in Suharto’s Indonesia*. Ithaca, NY: SEAP Publications. p.131

³³ Ryter, L., 1998. Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Freemen of Suharto’s Order? [e-journal] In Indonesia No. 66. Available through: JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/3351447> [Accessed 07/03/2015] p. 47

kekerasaan *Pemuda Pancasila*. Kekerasan *Pemuda Pancasila* tetap hadir pada masa reformasi, yaitu karena sebuah fakta adalah bahwa dalam organisasi *Pemuda Pancasila* diketahui ada sejumlah besar mantan preman dan preman aktif.³⁴

Pemuda Pancasila dituduh dan menyalahkan untuk penyebab konter demonstrasi yang menggunakan kekerasan, “menyerang LSM (*Lembaga Swadaya Masyarakat*) dan kantor partai politik, intimidasi dan penggusuran lahan secara paksa,”³⁵ sebagai beberapa aksi yang dilakukan oleh *Pemuda Pancasila*.

Seperti dilaporkan di *tempo*, *Pemuda Pancasila* sering berontak dengan organisasi lain termasuk Organisasi Buruh dan musuh *FBR (Forum Betawi Rempug)*.³⁶

Anggota-anggota *Pemuda Pancasila* di salah satu kasus di atas soal sengketa tanah di Depok, Jawa Barat terserang sidang pengadilan pada perintah Rudi Samin.³⁷ Ini salah satu kasus di antara sejumlah besar kasus intimidasi dan kekerasan yang *Pemuda Pancasila* pernah terlibat. Saat mahasiswa-siswi di Bandung dan Yogyakarta ditanya tentang kasus Rudi Samin, kebanyakan jawab dengan “inilah yang jelek tentang Indonesia,” dan “yang kaya, korup atau preman, selalu menang.”³⁸ Sambil diskusi kasus ini dengan Ani Sartika, seorang mahasiswi jurusan Manajemen Informasi dan Komunikasi *STMM*, Yogyakarta (Sekolah Tinggi Multimedia, Yogyakarta), dia menjelaskan:

“Seharusnya anggota Pemuda Pancasila yang terlibat dalam aksi ini, termasuk Rudi Samin dihukum. Tidak boleh melakukan aksi seperti itu tanpa konsekuensi hukum,

³⁴ Ibid., p.46-47

³⁵ Ibid., p.125

³⁶ Sundari., 2012. House: “Indonesia Should Freeze Pemuda Pancasila and Forum Betawi Rembug’s Activities.” [online] *Tempo*. <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/02/055414309/house-indonesia-should-freeze-pemuda-pancasila-and-forum-betawi-rembugs-activities> [Accessed 05/03/2015]

³⁷ Marhaenjanti, B., 2013. Court Wilts Under Attack from Pemuda Pancasila Thugs. [online] *Jakarta Globe*. Available at: <http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/court-wilts-under-attack-from-pemuda-pancasila-thugs/> [Accessed 06/03/2015]

³⁸ Referensi ke diskusi dengan seorang aktivis dan petani di B’jong café, Yogyakarta.

apabila hukum tidak ditegakkan maka bisa jadi semua orang yang akan menjalankan sidang dapat membawa preman dan bertindak mengkesampingkan hukum itu sendiri. Namun disinilah kelemahan hukum di Indonesia, dimana hukum itu tajam dibawah dan tumpul diatas, sehingga orang miskin tidak dapat keluar dari hukum, dan orang kaya dengan mudah dapat memanipulasi hukum itu sendiri dan keluar dari jeratan hukum.”³⁹

Pada saat survei orang-orang, hampir semua orang bingung tentang peranan Pemuda Pancasila dan tujuannya pada masa lalu dan pada masa ini. Tetapi ada yang mengucapkan bahwa mereka tahu tentang *Pemuda Pancasila* dari dokumenter film *The Act of Killing*,⁴⁰ yang cerita tentang keterlibatan anggota-anggota *Pemuda Pancasila* dalam pembunuhan di saat Orde Baru didasarkan. Seorang mahasiswi yang ingin dinamakan ‘Cyl’ dari FISIPOL (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) UGM, Yogyakarta menyatakan *Pemuda Pancasila* sebagai organisasi yang “ultra-nasionalis dan memalukkan Indonesia.”⁴¹ Menurut dia *Pemuda Pancasila* masih aktif dan dia berkata bahwa tindakan organisasi ini menakutkan dia. Yang ironis adalah bahwa Pemuda Pancasila mengklaim mereka mewakili prinsip Pancasila, tetapi prinsip keadilan sosial seringkali dilupakan dan organisasi dengan prinsip-prinsip keadilan sosial diserang. Seperti tersebut oleh Karen Laurencia, mahasiswi FISIP, UNPAR Bandung: “Pemuda Pancasila menggunakan Pancasila dalam nama tetapi yang mereka berbuat tidak merefleksikan artinya Pancasila.”⁴²

Walau, anggota-anggota *Pemuda Pancasila* tidak menganggap organisasinya sebagai masalah. Namun, “sebagai organisasi yang membela pancasila sejak 1959

³⁹ Dalam diskusi dengan mahasiswi Ani Sartika dari STMM, Yogyakarta (Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta) 20/03/2015

⁴⁰ *The Act of Killing*. 2012. [Film] Directed by Joshua Oppenheimer: Dogwoof

⁴¹ Diskusi di Yogyakarta, 20/04/2015

⁴² Diskusi di Bandung, 23/04/2015

sambil kelompok lain mendukung NASAKOM.”⁴³ Saya tidak dapat jawaban oleh Pemuda Pancasila Depok, Jawa Barat jadi saya menghubungi *Pemuda Pancasila* di Yogyakarta dan mendapat izin untuk berkumpul, diskusi dan wawancara anggota *Pemuda Pancasila* jika wawancara itu tanpa nama.

Di Sleman, Yogyakarta, saya berkumpul dan diskusi dengan lima anggota dari *Pemuda Pancasila* yang ingin tanpa nama. Dalam diskusi ini, saya ingin mencari tahu pendapat dari anggota-anggota biasa *Pemuda Pancasila* dan alasan mereka terlibat dalam organisasi paramiliter ini. Saya mulai bertanya satu anggota yang ingin diwawancara tetapi tanpa nama, dengan pertanyaan tentang situasi kebebasan. Berikut ada pertanyaan dan jawaban:

Apa pendapat anda terhadap status demokrasi dan kebebasan pada masa

Orde Baru dan masa ini?

Anggota PP: “Status demokrasi pada masa ini jalan, tetapi kebebasan sebenarnya pada masa ini terlalu bebas. Pada masa Orde Baru cukup bebas sebenarnya. Sekarang ada banyak organisasi yang ingin membuat masalah di Indonesia dan merubah budaya Indonesia.”

Apa tujuan dan peran Pemuda Pancasila pada masa ini?

“Tujuan PP, menurut saya, ada fokus untuk menjaga Indonesia dan selalu menegakkan prinsip Pancasila. Pemuda Pancasila juga bisa menekan kantor untuk menyelesaikan sesuatu kalau dipaksa.”

⁴³ Anderson, B.R’O.G., 2001. *Violence and the State in Suharto’s Indonesia*. Ithaca, NY: SEAP Publications. p.126

Apa anda tahu tentang kasus Rudi Samin dan Pemuda Pancasila terlibat dalam menyerang sidang. Apa itu salah satu kasus pemuda Pancasila terpaksa untuk campur tangan?

“Saya tidak tahu tentang kasus ini.”

Setelah menjelaskan kasus ke anggota PP ini, dia menolak komen tentang kasus tersebut. Tetapi dia kata bahwa itu “jarang terjadi.”

Pemuda Pancasila dituduh dan terbukti untuk terlibat dalam beberapa kasus kekerasan, tidak hanya di masa ini. Apa yang membuat anda ingin mengikut?

“Kadang-kadang kekerasan diperlukan untuk membuat perubahan. Apa reformasi dicapai dengan cara damai? Ya toh!? Tetapi ada banyak kasus anggota PP menang tuntutan dengan cara damai. Saya mulai mengikut karena ada beberapa kumpulan dan bisa bertemu anggota dengan pemikiran yang sama.”

Apa Pemuda Pancasila melupakan keadilan sosial saat menyerang demonstrasi organisasi buruh?

“Saya setuju dengan penyebab organisasi buruh, tetapi tidak setuju dengan cara, karena seringkali organisasi buruh mogok dan produksi terhenti da nada efek pada ekonomi Indonesia. Ini tak santun dan membuat masalah untuk Indonesia, jadi *Pemuda Pancasila* harus melakukan sesuatu.”⁴⁴

Ada anggota-anggota selain yang disaat diskusi memberikan alasannya untuk mengikut karena dia ‘suka seragam *Pemuda Pancasila*’ dan ada juga yang menyebut karena dalam organisasi itu semua merasa seperti keluarga.

⁴⁴ Wawancara anggota Pemuda Pancasila di Sleman, Yogyakarta., 30/03/2015.

2.3 *Elitisme dalam Demokrasi*

Jika analisa tulisan Leo Suryadinata tentang kepercayaan elit kepada Suharto tidak bisa tahan lama lagi pada tahun 1998, maka itu jelas bahwa itu elit yang ingin melanjutkan praktek dalam politik seperti dulu di Orde Baru, dengan adanya kemajuan yang di rasakan masyarakat Indonesia, tetapi dalam kenyataannya kemajuan tersebut hanyalah perubahan yang tidak signifikan. Menurut Leo Suryadinata “pemerintah Habibie pada waktu itu adalah melanjutkan hidup Orde Baru,”⁴⁵ tetapi dalam kerangka itu, hal yang penting berubah. Menurut Törnquist di Inside Indonesia, “politik pada umum melanjutkan dimonopolisasikan oleh elit. Tetapi kelompok elit lebih lebar, lebih lokal dan kurang militer dari pada di bawah Suharto.”⁴⁶

Argumen ini juga didukung oleh Vltchek yang menyebutkan “pada kenyataannya, elit memperkuat cekauannya pada kekuatan; mereka berhasil membuat garis di antara korban dan penjahat tidak jelas.”⁴⁷ Menurut Vltchek “sistem hanya menjagakan elit” dalam bidang hukum. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa kasus keadilan, yang mengkriminalisasi masyarakat kecil seperti kasus Nenek Asyani, sedangkan ada kasus korupsi seperti Suharto, Akbar Tanjung⁴⁸ dan lain, yang dengan mudah dialihkan dengan beberapa alasan.⁴⁹

Demokrasi masih kelihatan didominasi oleh tokoh elit, dari kelompok-kelompok berbeda dan dalam politik Indonesia sejumlah besar dari Orde Baru tetap terlibat

⁴⁵ Suryadinata, L., 1999. A Year of Upheaval and Uncertainty: The Fall of Suharto and Rise of Habibie. In *South East Asian Affairs*. JSTOR:

<http://www.jstor.org/stable/27912223> [Accessed 24/02/2015] p.115

⁴⁶ Törnquist, O., 2008. How far to meaningful democracy II? *Inside Indonesia*: [online] Available at: <http://www.insideindonesia.org/how-far-to-meaningful-democracy-2> [Accessed 27/03/2015]

⁴⁷ Vltchek, A., 2012. *Indonesia: Archipelago of Fear*. London: Pluto Press. p.81

⁴⁸ Vltchek, A., and Indira, R., 2006. *Exile: In conversation with Pramoedya Ananta Toer*. Ed Nagesh Rao. Chicago: Haymarket Books. p.125

⁴⁹ Vltchek, A., 2012. p.142-143

dalam sistem politik di masa reformasi. Seperti dijelaskan oleh Suryadinata, Habibie ada satu simbol Orde Baru. Pengganti Susilo Bambang Yudhoyono SBY juga ada peran dalam Orde Baru dengan latar belakang dalam TNI, dan ternyata juga ada berhubungan dekat dengan elit dan tokoh-tokoh dari Orde Baru, termasuk Sarwo Edhie Wibowo.⁵⁰ Menurut temuan “*International Consortium of Investigative Journalists*, sembilan keluarga paling kaya di Indonesia berharga US\$36 billion. Di antara sembilan keluarga, enam keluarga ada berhubungan dengan mantan-mantan Presiden.”⁵¹ Oleh karena itu, sebagai proses untuk mewakili rakyat, kelompok elit-elit ini ada kemungkinan menghindari proses reformasi, khususnya demokrasi dan menjelekan prakteknya melalui nepotisme dan budaya dan praktek bekas Orde Baru. Menurut dosen UGM, Arif Rokhman “elit selalu akan mencoba untuk berkuasa negara, sayangnya elit biasanya lebih fokus ke tujuan mereka sendiri, jadi keperluan masyarakat dibuat prioritas kedua.”⁵² Pada subjek perwakilan rakyat dan elitisme, Andre Vltchek seorang penulis, aktivis dan *filmmaker* berkata bahwa:

“anggota dengan peran penting dalam partai politik Indonesia pada suatu tempat ada berkenalan dengan keluarga elit. Golkar ada Bakrie yang bertanggungjawab untuk bencana Lapindo, Gerindra ada Prabowo seorang mantan TNI yang berdiri melawan demokrasi pada tahun 1998. PDI-P ada Megawati terkenal hanya karena dia putri Sukarno, Nasdem ada Surya Paloh yang pemilik Metro TV dan juga pernah menjabat pada masa Suharto. Menghubungkan titik-titik, demokrasi Indonesia, yang benar saja, tidak mewakili kepentingan rakyat dan terdiri-dari kelompok elit.”⁵³

⁵⁰ Ibid., 2012. p.74

⁵¹ Gunn, C.G., 2014. Indonesia in 2013: Oligarchs, Political Tribes and Populists. In *Asian Survey* [e-journal] JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2014.54.1.47> [Accessed 28/03/2015] p.47

⁵² Wawancara, Arif Rokhman, UGM: Yogyakarta, 27/04/2015

⁵³ Diskusi dengan Andre Vltchek, Yogyakarta: 05/11/2014

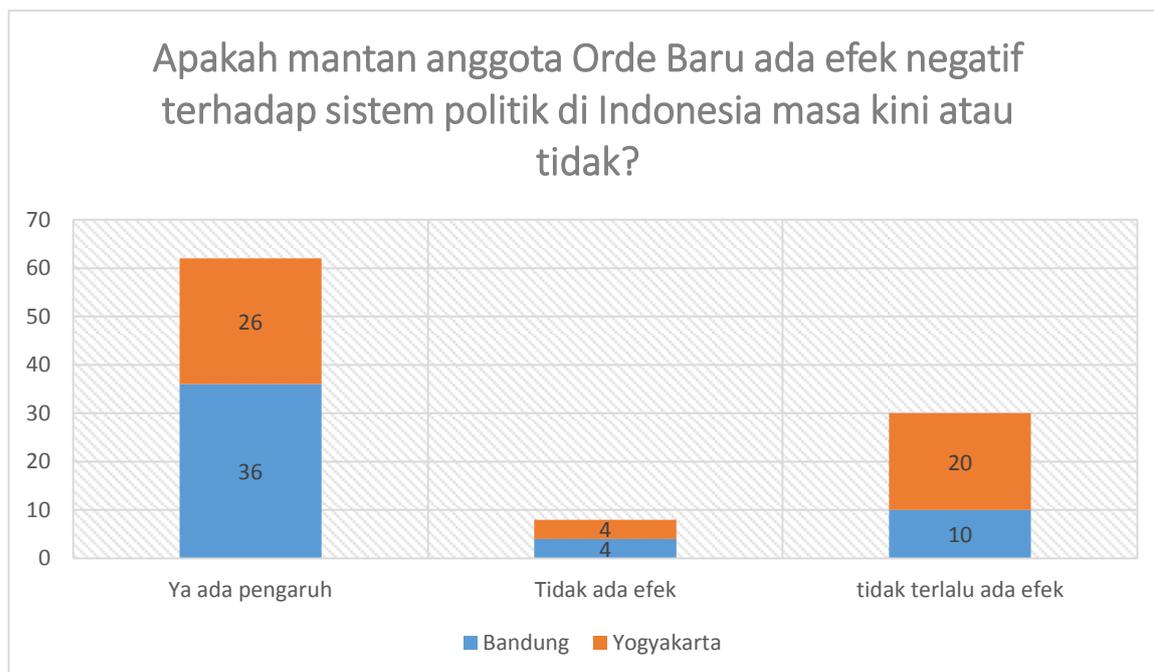
Saya pernah diberitahu oleh seorang dari Jakarta yang ingin tanpa nama, tentang nepotisme di kantor pemerintah, yaitu bahwa nepotisme adalah “sesuatu yang sering,” dan “tergantung kamu tahu siapa.” Saya diberitahu bahwa di keluarganya sendiri ada kakaknya yang mendapat pekerjaan di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan pamannya yang memegang posisi dalam Mahkamah Konstitusi, dan hal ini terjadi dalam masa reformasi. Saat ditanya apa pendapatnya tentang hal ini, dia menjawab bahwa “sebenarnya saya tidak setuju, tetapi ini sistem disini.”⁵⁴ Ini salah satu contoh kasus nepotisme yang dibuat biasa dalam masyarakat.

Salah satu pertanyaan yang ditanyakan dalam survei masyarakat adalah bahwa jika menurut pendapat masing-masing orang; *‘apakah mantan anggota Orde Baru ada efek negatif terhadap sistem politik di Indonesia masa kini atau tidak?’*

Menurut hasil survei, 20 orang yang disurvei di Yogyakarta menjawab bahwa *‘mantan anggota Orde Baru tidak terlalu ada efek kepada proses,’* sedangkan di Bandung 10 orang menjawab dengan ini. Tetapi, empat peserta yang disurvei dari kedua kota ini bilang bahwa mantan anggota Orde Baru *‘tidak ada efek.’* Ini dibandingkan dengan 36 orang dari Bandung yang menjawab dengan pernyataan *‘ya, ada pengaruh,’* sambil di Yogyakarta 26 peserta menjawab dengan ini. Yang jelas di antara pemikiran di antara dua kota ini adalah bahwa masyarakat di Yogyakarta lebih optimistis terhadap peran mantan anggota Orde Baru dalam politik, sedangkan di Bandung pemikiran terhadap peran mantan anggota Orde Baru agak negatif dan lebih ke arah skeptis dan tidak terlalu percaya pada mantan anggota Orde Baru.

Hasil ini diteliti di bawah:

⁵⁴ Diskusi dengan seorang yang ingin tanpa nama, Jakarta: 22/08/2014



Hasil ini menarik, karena itu menunjukkan bahwa mantan anggota Orde Baru dianggap sebagai aspek yang negatif oleh kebanyakan peserta. Di saat ditanyakan alasan memilih *tidak ada efek*, beberapa peserta menjawab dengan yang dijelaskan oleh Tiara Juliana, seorang mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung: “tidak terlalu masalah jika ada mantan anggota sistem Orde Baru, karena ada politisi yang baru tetapi tetap menjelekkan proses demokrasi, sedangkan, mantan anggota Orde Baru sudah bisa reformasi diri sendiri.”⁵⁵

2.3.1 Kesimpulan

Bagian penelitian demokrasi dan kebebasan sudah menunjukkan perubahan dalam nilai dan status Indonesia setelah Suharto mengundurkan diri dan proses reformasi menaikkan tingkat kebebasan drastis. Yang telah juga diamati adalah nilai kebebasan Indonesia selama reformasi, yang menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2006, kebebasan di

⁵⁵ Diskusi dengan Tiara Juliana, Bandung: 25/04/2015

Indonesia berhenti maju dan pada tahun 2013, kebebasan turun. Untuk analisa persoalan ini, masyarakat ditanya jika merasa perbedaan pada tingkat kebebasan selama reformasi. Sebagai hasil survei ini, ada petunjuk kesadaran dalam masyarakat pada situasi kebebasan karena lebih dari setengah peserta menyebut bahwa kebebasan naik dan turun.

Bagian penelitian yang membahas kasus Pemuda Pancasila menunjukkan Pemuda Pancasila sebagai salah satu organisasi yang sering tindakan sebagai hambatan demokrasi. Penelitian telah menunjukkan sejarah dan peran Pemuda Pancasila dalam sistem Orde Baru, dan tindakan terakhir di bawah sistem Orde Baru. Penelitian ini juga menunjukkan peran dalam tindakan kekerasan pada masa ini, dan cara yang digunakan oleh Pemuda Pancasila yang tidak demokratis. Penelitian ini juga telah berusaha untuk memahami peran Pemuda Pancasila dalam Indonesia pada masa ini.

Bagian terakhir di bab ini, yang membahas elitisme dan demokrasi menunjukkan bahwa reformasi dalam kerangka demokrasi masih menyerupai sistem Orde Baru. Yang diubah adalah kerangka politik, tetapi yang memegang kekuasaan di ruang politik adalah elit. Hal ini juga ditunjukkan hadir dalam perbedaan di antara masyarakat kecil dan elit dihadapan hukum, ini bisa dianggap sebagai salah satu warisan Orde Baru. Hal ini juga didukung oleh pemikiran masyarakat, bahwa mantan anggota Orde Baru ada pengaruh pada proses politik.

3. Korupsi Pada Masa Orde Baru dan Sekarang (Reformasi).

Suharto adalah salah satu pemimpin terkorup yang dunia ini pernah melihat menurut *Transparency International*.⁵⁶ Pada saat saya berkumpul dengan Andre Vltchek di Yogyakarta, dia berkata bahwa jumlah uang negara yang menghilang

⁵⁶ Denny, C., 2004. Suharto, Marcos and Mobutu head corruption table with \$50bn scams. [online] *The Guardian*. <http://www.theguardian.com/world/2004/mar/26/indonesia.philippines> [Accessed 24/04/2015]

dibawah Suharto, keluarganya dan kroninya memang sangat besar dan “Jumlah aset dan uang negara Indonesia yang menghilang dibawah Presiden Suharto sampai sekarang tidak bisa ditentukan, tetapi angkanya di antara \$20bn-\$35bn.”

Dia berkata bahwa Suharto “memang korup, tetapi keluarganya lebih korup lagi.” Korupsi di masa Suharto yang disebut di atas sangat tinggi, dan sambil diskusi korupsi Orde Baru dengan Andre Vltchek, dia berkata bahwa “korupsi tidak hanya pemimpinnya, tetapi turun ke masyarakat dan menjadi benar-benar hadir di semua aspek masyarakat dan di hidup setiap hari.”⁵⁷

Saat masyarakat disurvei tentang tangan Orde Baru dalam membuat budaya korupsi, setengah peserta menganggap orang dalam sistem itu sendiri. Persoalan ini juga disebut oleh Newman:

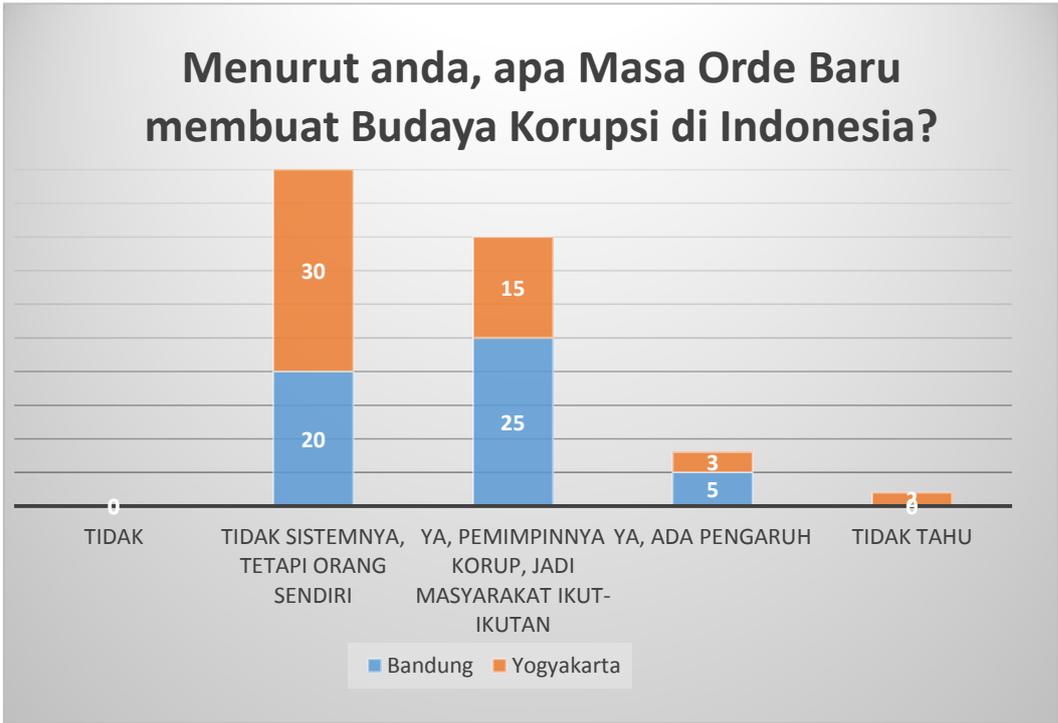
“Korupsi di Indonesia ada seperti Coca-Cola [...] dan tentu saja masalah menjadi lebih luas dari penyusunan billion rupiah yang menaikkan yang sudah kaya dan berkuasa. Korupsi telah menjadi tertanam dalam masyarakat Indonesia dan hidup setiap hari.”⁵⁸

Berikut merupakan hasil survey yang sudah saya teliti:

Grafik Hasil Survey

⁵⁷ Diskusi sambil makan siang dengan Andre Vltchek di Yogyakarta pada bulan November 2014.

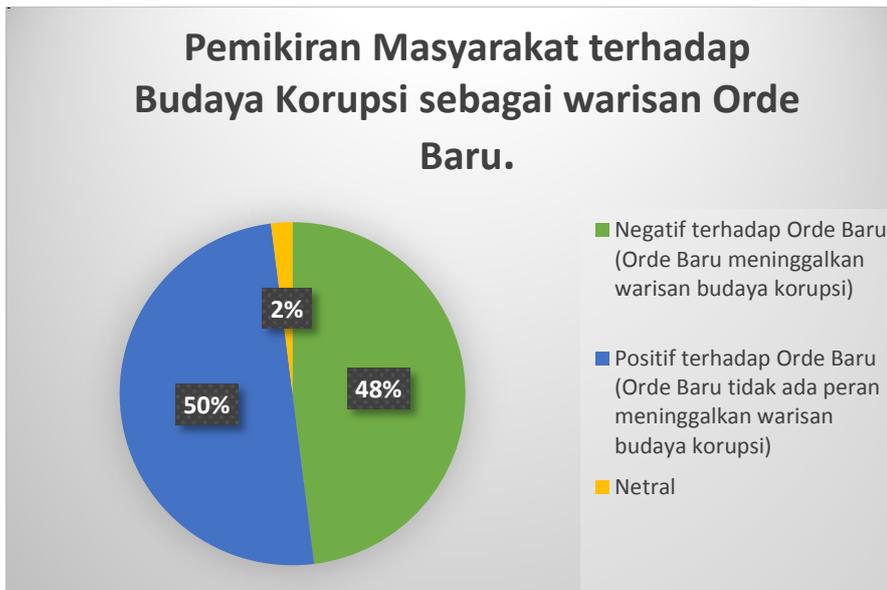
⁵⁸ Newman, N., 2012. Indonesia: Telling Lies. In *World Policy Journal*. Vol. 28, No. 4. [e-journal] JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/41479308> [Accessed 19/02/2015] p. 84.



Dalam pertanyaan survei ini ada dua jawaban yang mengidentifikasi bahwa Orde Baru tidak penyebab budaya korupsi, yaitu *‘tidak sistemnya, tetapi orang sendiri’* dan *‘tidak.’* Dan ada dua jawaban yang mengidentifikasi Orde Baru sebagai penyebab budaya korupsi *‘ya pemimpinnya korup, jadi masyarakat ikut-ikutan’* dan *‘ya ada pengaruh,’* maupun ada satu jawaban netral, yaitu *‘tidak tahu.’* Ini mencapai dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, tetapi yang ini mencapai adalah untuk mengerti jika jawaban adalah negatif atau positif terhadap Orde Baru. Negatif berarti bahwa jawaban mengidentifikasi jika Orde Baru penyebab dan meninggalkan warisan budaya korupsi, sedangkan positif adalah bahwa Orde Baru tidak mengidentifikasi sebagai penyebab budaya korupsi.

Penelitian tersebut digambarkan dalam grafik di bawah:

Grafik Hasil Pemikiran Masyarakat:



Dalam grafik tersedia warna biru mewakili pemikiran yang tidak mengidentifikasi Orde Baru sebagai penyebab budaya korupsi, sedangkan warna hijau mewakili pemikiran yang mengidentifikasi Orde Baru sebagai penyebab budaya korupsi. Dan warna kuning adalah netral.

Dari hasil penelitian, 50% peserta tidak menyalahkan atau tidak merasa bahwa sistem pada Orde Baru bertanggung jawab sepenuhnya untuk warisan budaya korupsi, sedangkan 48% peserta yang disurvei merasa bahwa Orde Baru ada peran dalam meninggalkan warisan budaya korupsi. 2% peserta menyatakan tidak terlalu memahaminya (netral). Hasil ini menunjukkan bahwa pemikiran masyarakat terhadap Orde Baru sebagai warisan dalam budaya korupsi di Indonesia adalah terbagi, tetapi, sama dibagi. Hasil ini tidak terlalu mengejutkan saya karena sebelum saya mulai survei orang-orang, saya sudah pernah terlibat dalam diskusi politik khususnya dengan orang-orang yang pernah pendidikan di bawah sistem Orde Baru dan tidak menganggap Orde Baru dengan meninggalkan warisan itu. Di antara mahasiswa-siswi, kebanyakan melihat Orde Baru sebagai penyebab budaya korupsi, tetapi dari penelitian di Yogyakarta saya mencari tahu bahwa mahasiswa-siswi lebih simpatik untuk

menyalahkan Orde Baru sebagai penyebab budaya korupsi.⁵⁹

Walau, tidak ada satu jawaban yang memilih *'tidak'* yang termasuk kategori sangat positif terhadap Orde Baru. Ini menunjukkan bahwa jawaban yang dipilih yang agak positif terhadap Orde Baru termasuk perasaan skeptisme terhadap actor-aktor dalam sistem. Saat ditanyakan tentang jawaban, sejumlah besar orang yang memilih *'tidak sistemnya tetapi orangnya sendiri'* menjawab bahwa mereka "pernah diajar bahwa Orde Baru tidak begitu buruk untuk Indonesia" dan juga ada yang "tidak terlalu tahu tentang hal-hal itu."⁶⁰ Apapun alasannya untuk memilih salah satu jawaban, yang jelas adalah pemikiran terhadap Orde Baru sebagai penyebab budaya korupsi adalah terbagi hampir setengah setengah.

asarakat

Saat ditanyakan tentang masa reformasi dan masa depan untuk Indonesia, Andre Vltchek berkata bahwa situasi korupsi di Indonesia "hampir mustahil untuk menghilang karena itu sudah menjadi terlalu dalam sebagian masyarakat," dan "oleh karena itu, saya sudah berhenti mencoba mempengaruhi Indonesia dengan tulisan saya."⁶¹ Tetapi menurut sudut pandang Snape pada tahun 1999, korupsi yang tidak terkendali adalah karena fungsi demokratis tidak ada:

3.
1
E
v
o
l
u
s
i
K
o
r
u
p
s
i
d
a
n
e
f
e
k
M

⁵⁹ 55% di antara 25 mahasiswa-siswi yang disurvei di Yogyakarta.

⁶⁰ Saat ditanya tentang jawaban yang diberikan. Hasil diskusi setelah melakukan survei.

⁶¹ Diskusi sambil makan siang dengan Andre Vltchek pada saat dia berkunjung saya di Yogyakarta pada tanggal 5 November 2014. Diskusi pada umum tentang politik Indonesia dan dunia.

“Kurang bertanggung jawab, transparansi, institusi demokratis dan media bebas, adalah faktor penting yang kontribusi kepada jengkauan korupsi di masyarakat. Politik Indonesia di bawah Presiden Suharto ditandai dengan kurang semua hal itu.”⁶²

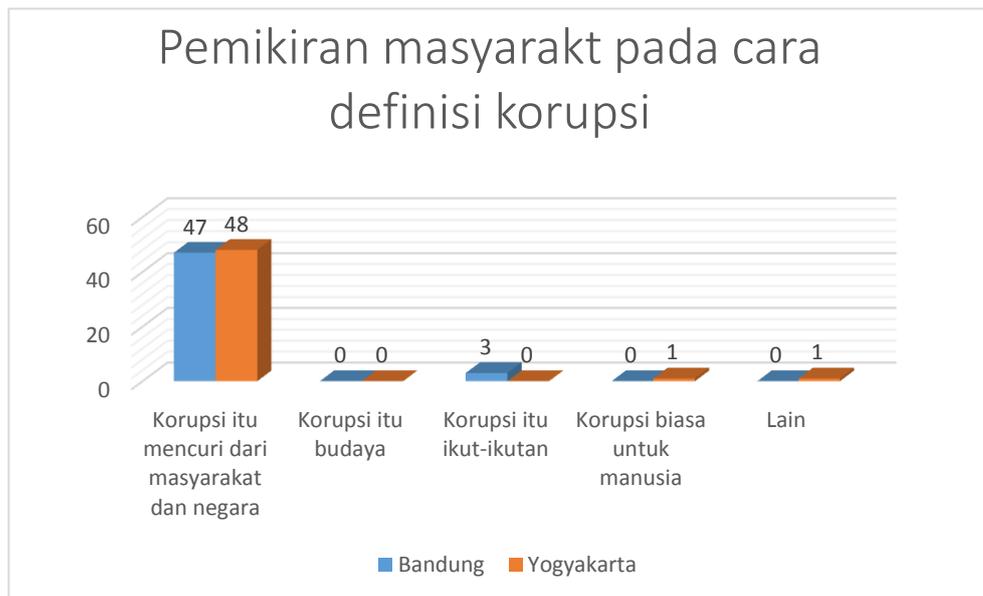
Jika tulisan Snape benar, dengan menjadi demokrasi, Indonesia yang lebih transparan, pegawai-pegawai dan pembuatan undang-undang yang bertanggung jawab ke masyarakat, dan dengan media bebas, seharusnya kurangi budaya korupsi di masa ini. Tetapi, Indonesia 17 tahun setelah awal mulai reformasi, masih ada masalah korupsi yang kelihatan sangat besar dan seperti akan dibahas dengan penelitian, masyarakat juga memahami korupsi sebagai isu yang masih besar. Untuk mengerti korupsi dari sudut pandang perspektif populer, maka definisi korupsi yang dibayangkan oleh masyarakat sendiri harus dianalisa.

Sambil survey masyarakat, ada empat kalimat tentang definisi korupsi dan satu kotak untuk membuat definis sendiri. Kebanyakan memilih definisi korupsi sebagai *‘korupsi itu mencuri dari masyarakat dan negeri,’* tetapi hanya satu peserta yang disurvei tambah definisi korupsi sendiri, yaitu, M. Fiqi Ari Latif. Dia adalah seorang mahasiswa dari UGM, Fakultas Peternakan, yang menyebut pendapatnya pada definisi korupsi untuk Indonesia sebagai “menjajah diri sendiri.”⁶³

⁶² Snape, F., 1999. Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia. [e-journal] Vol 20. No. 3, *Third World Quarterly*. JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/3993323> [Accessed 23/02/2015] p. 591

⁶³ Pernyataan ini adalah referensi ke sumber yang ditulis dalam survey.

Penelitian tersebut digambarkan dalam grafik di bawah:

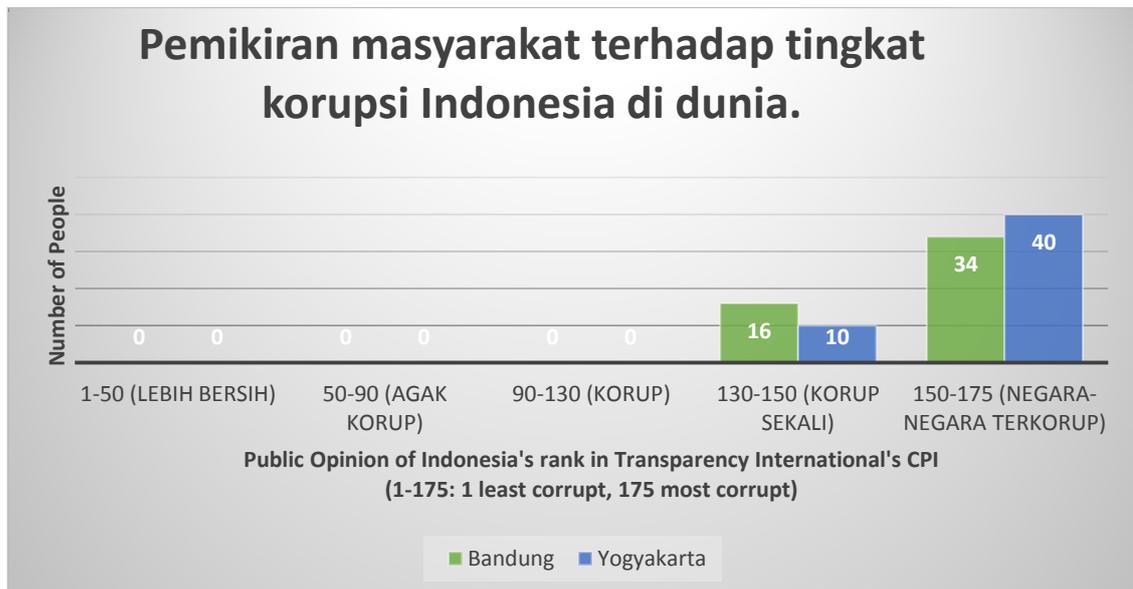


Pada tahun 2014, menurut Transparency International *CPI (Corruption Perception Index)* Indonesia nilai 107 di antara 175 negara. Ini berarti bahwa situasi lebih buruk daripada India yang dinilai dengan pangkat 85 di antara 175 negara.⁶⁴ Terhadap data dari *CPI Transparency International 2014*, masyarakat di Bandung dan Yogyakarta disurvei tentang nilai Indonesia di antara 175 negara. Menurut sejumlah besar peserta survei, Indonesia dianggap sebagai termasuk kelompok Negara yang terkorup di dunia, walaupun, sebetulnya menurut *CPI Transparency International* Indonesia tidak masuk negara-negara yang terkorup.

⁶⁴ Transparency International., 2015. Corruption Perceptions Index 2014: Results. Available at: <http://www.transparency.org/cpi2014/results> [Accessed 05/01/2015]

Berikut merupakan hasil survei yang sudah saya teliti:

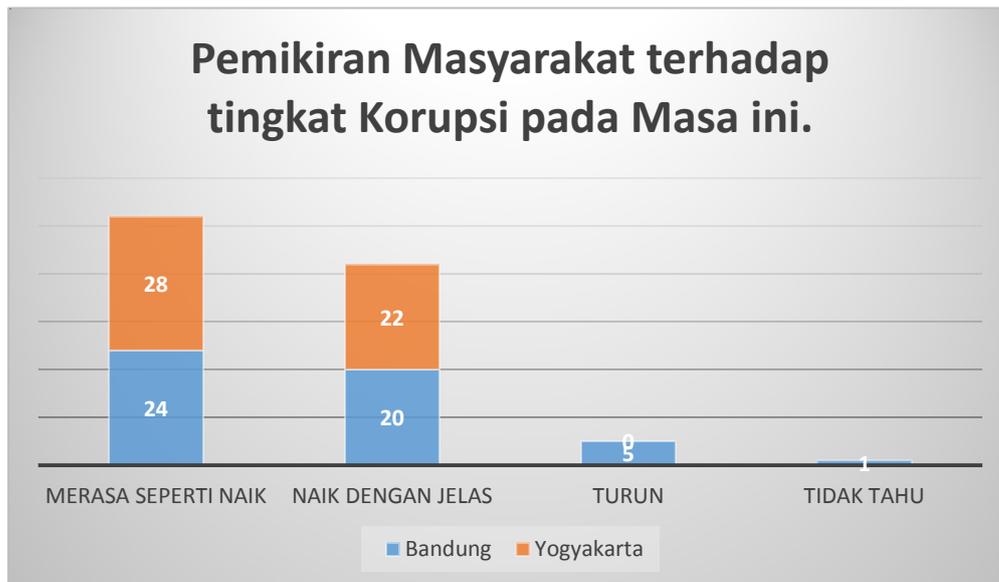
Grafik Hasil Survei



Dari hasil survei ini, yang jelas adalah pemikiran masyarakat dari kedua kota ini adalah bahwa Indonesia termasuk negara-negara yang korup sekali dan negara-negara terkorup, walaupun, dengan data dari *Transparency International* Indonesia termasuk negara yang korup dengan nilai 107, tetapi tidak terkorup. Dari hasil survei, tidak ada satu peserta yang memilih nilai Indonesia di antara 90-130 negara atau di bawah angka itu. Ini mengungkapkan bahwa pemikiran masyarakat adalah bahwa Indonesia masih korup dan masalah korupsi adalah masalah yang besar. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hasil ini. Salah satu alasan yang saya sering ditemukan adalah bahwa dalam hidup peserta yang disurvei, korupsi adalah hal yang sering dialami atau diketahui tentang.

Dengan hasil penelitian di atas, pemikiran masyarakat merefleksikan tingkat korupsi Indonesia dalam dunia, tetapi yang juga ditanya adalah tentang tingkat korupsi setelah Orde Baru, yaitu pendapat peserta survei masing-masing jika tingkat korupsi pada masa ini *merasa seperti korupsi naik, naik dengan jelas, turun, atau tidak tahu.*

Berikut ada hasil survei yang sudah saya teliti:



Hasil survey ini menunjukkan bahwa sebagian besar, yaitu 94% peserta dalam survei ini, merasa bahwa korupsi pada masa ini naik, sedangkan %5 merasa korupsi turun dan 1% tidak tahu.

Saat diskusi hal ini dengan mahasiswi Karen Laurencia dari FISIP, UNPAR, Bandung, dia menyatakan bahwa:

“Korupsi sejak masa Orde baru masih terjadi, saya tidak terlalu tahu kalau naik atau tidak karena kebanyakan korupsi selama di Orde Baru tidak diketahui. Tetapi saya pikir pada masa ini orang-orang lebih sadar tentang korupsi jadi lebih pelaku korupsi ditangkap.”⁶⁵

Sedangkan, Pricylia Wulandari seorang mahasiswi FISIPOL, UGM, Yogyakarta menyatakan pendapatnya adalah bahwa:

“entah bagaimana, saya pikir korupsi naik sebagai hasil demokrasi kami yang belum dewasa melakukan desentralisasi. Ini memberikan kesempatan dari tingkat

⁶⁵ Diskusi status korupsi dengan Karen Laurencia, UNPAR, Bandung., 23/04/2015.

bawah ke tingkat tinggi pemerintah untuk jadi korup, ini berarti bahwa korupsi lebih dimensi.”⁶⁶

Tingkat kasus korupsi kontemporer menurut *Jakarta Post* muncul telah naik, yaitu khususnya di Jawa Tengah “dengan orang-orang yang pegawai sipil dan pembuat undang-undang utama pelaku kesalahan,”⁶⁷ tidak jauh berbeda dari praktek dalam sistem Orde Baru. Data dari *KPK (Corruption, Collusion and Nepotism Investigation and Eradication Committee)* Jawa Tengah mengungkapkan bahwa ada 102 kasus yang tercatat pada tahun 2011. Angka ini naik menjadi 215 kasus pada tahun 2012 dan naik lagi menjadi 222 kasus pada tahun 2013.⁶⁸ Metodologi yang digunakan untuk memeriksa kasus korupsi ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan dan pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 1997, *Transparency international* menilai Indonesia 46 di antara 52 negara di *Corruption Perception Index*,⁶⁹ sedangkan:

“pada tahun 1998 *Transparency International* CPI menilaikan Indonesia sebagai 80 di antara 85. Ini berarti bahwa menurut sebuah polling jajak pendapat, Indonesia dirasakan oleh konsultan dan orang-orang bisnis sebagai salah satu negara yang terkorup yang melihat oleh survei ini.”⁷⁰

Menurut data di antara tahun 1997-1998, maka, persepsi index korupsi untuk Indonesia sedikit memperbaiki, yaitu pada nilainya, walau yang jelas masih ada jalan yang panjang. Seperti telah tersebut, data untuk masa Orde Baru tidak tercatat dengan baik dan ada kesulitan untuk mencari tahu luasnya korupsi. Jadi hal ini membuat sulit untuk dibandingkan dengan tentunya. Walau yang jelas dibandingkan dengan masa Orde Baru dan Masa ini

⁶⁶ Diskusi status korupsi dengan Priscyia Wulandari, Yogyakarta., 13/03/2015

⁶⁷ *Jakarta Post.*, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/08/corruption-cases-rise-abuse-political-power.html> [Accessed 02/03/2015]

⁶⁸ *Ibid.*, 2014.

⁶⁹ *Transparency International.*, 2015. *Corruption Perception Index 1997*. Available through *Transparency International*: https://www.transparency.org/files/content/tool/1997_CPI_EN.pdf [Accessed 02/03/2015]

⁷⁰ Snape, F., 1999. *Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia*. [e-journal] Vol 20. No. 3, *Third World Quarterly*. JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/3993323> [Accessed 23/02/2015] p.589

adalah bahwa lebarnya dicatat dan dilaporkan oleh organisasi-organisasi dan media.

Sedangkan di masa Orde Baru tidak ada media yang berani melaporkan kasus korupsi jika pegawai-pegawai ada peran dengan tingkat tinggi.

3.1.1 Kesimpulan

Pertama bagian di bab ini membahas persoalan korupsi pada masa Orde Baru dan sekarang. Penelitian ini menemukan bahwa 50% peserta tidak menganggap Orde Baru sebagai penyebab budaya korupsi di Indonesia, sedangkan 48% menganggap bahwa Orde Baru ada peran dalam hal ini, sambil 2% netral atau tidak tahu.

Terakhir bagian membahas tentang pemikiran masyarakat terhadap korupsi dalam masa reformasi. Ini mulai dengan memeriksa pemikiran masyarakat terhadap tingkat korupsi Indonesia dalam dunia. Hasil ini agak mengejutkan saya, karena semua peserta memilih Indonesia dalam kategori '*negara korup sekali*' dan '*negara terkorup.*' Berikut ini pemikiran masyarakat terhadap korupsi di masa reformasi diperiksa, dan kebanyakan peserta memilih bahwa korupsi naik, yaitu '*merasa seperti naik.*' Seperti sudah diperiksa, korupsi pada masa ini lebih tercatat dan bisa dilaporkan dengan lebih mudah.

Bab ini menunjukkan bahwa ada kesadaran kepada warisan yang ditinggalkan pada masa ini, dan juga ada yang tidak menganggap Orde Baru sebagai meninggalkan warisan, tetapi efeknya, yaitu korupsi tetap dirasakan. Oleh karena itu korupsi menunjukkan diri sebagai warisan Orde Baru yang hadir di masa kontemporer ini.

IV Kesimpulan

Salah satu teriakan dari gerakan reformasi adalah untuk mengurangi dan menghilangkan *KKN*, walau penyelesaian untuk persoalan ini belum dicapai dan tingkat korupsi yang tinggi masih menghantui Indonesia sebagai diamati. Penelitian ini menggambarkan

persoalan yang pada umum menunjukkan kesamaan di antara masa Orde Baru dan masa reformasi, tetapi dengan lebih jelas meninggalkan warisan pada masa reformasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem di Indonesia masih sangat elitis dan walaupun badanya berbeda, yaitu dengan nama demokrasi dan menaikkan kebebasan, mesin masih sama, yaitu cara praktek politik.

Pertama penelitian ini, menunjukkan melalui sejarah, prinsip yang Orde Baru didasarkan pada, lalu menunjukkan alasan korupsi naik pada masa Orde Baru dan menjadi tidak terkendali. Akhirnya, proses reformasi yang tidak mencapai perubahan rezim tetapi perubahan cara negara berfungsi, yaitu sebagai demokrasi.

Kedua, penelitian ini mulai dengan mengakui bahwa transformasi pada sistem dibandingkan dengan Orde Baru ada perubahan yang signifikan, khususnya untuk bidang demokrasi dan kebebasan. Namun, Bab ini menegaskan bahwa kebebasan dan demokrasi menghadapi penghambatan dan belakangan ini, bidang ini tidak mendapat kemajuan setelah tahun 2006. Kasus *Pemuda Pancasila* menunjukkan salah satu organisasi, yang melanjutkan hidup sebagai warisan Orde Baru. Salah satu contoh yang digunakan dalam Bab ini adalah tentang kelanjutan guna kekerasan *Pemuda Pancasila* dalam tindakannya. Bab ini juga menunjukkan kelanjutan keterlibatan elit dalam politik, berhubungan dekat dengan keluarga elite dan bahwa mantan anggota Orde Baru dan TNI masih terlibat dalam politik. Akibatnya, temuan penelitian ini adalah bahwa pemikiran masyarakat terhadap keterlibatan mantan anggota adalah terbagi, dengan lebih dari setengah peserta menganggap mantan anggota Orde Baru sebagai efek negatif pada politik Indonesia.

Bab Tiga memeriksa korupsi di antara masa Orde Baru dan masa reformasi, dan dalam proses mengumpulkan pemikiran masyarakat terhadap beberapa persoalan yang

menunjukkan perasaan masyarakat terhadap kedua masa. Di bagian terakhir, ada diskusi tentang tingkat korupsi Indonesia dalam dunia, hasil ini menjadi penting karena di saat data dianalisa, itu memberikan kesempatan untuk menggangap skala keseriusan korupsi dalam pemikiran masyarakat.

Akibatnya penelitian di Bab ini menemukan bahwa, walaupun setengah peserta merasa Orde Baru tidak adalah penyebab budaya korupsi di Indonesia pada masa ini, hampir 100% peserta menggangap korupsi sebagai masalah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa efek korupsi terasa oleh masyarakat dan kehadirannya berfungsi sebagai mesin yang melanjut.

Penelitian ini, menyimpulkan bahwa pemikiran masyarakat terhadap masa Orde Baru dan masa ini adalah terbagi, tetapi ada kesadaran dari bagian masyarakat terhadap faktor korupsi, elitisme dan organisasi paramiliter yang tertinggal sebagai warisan Orde Baru. Sebagai hasilnya, warisan Orde Baru sebagai badan atau bentuk yang berbeda dengan mesin yang sama, menghantui demokrasi dan kebebasan serta memiliki warisan yang bertahan lama kepada situasi korupsi dan masyarakat.

4.1 Implikasi

Dengan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pemikiran dan perasaan masyarakat terhadap aspek-aspek masa Orde Baru dan reformasi, yang muncul sebagai warisan.

Faktor-faktor tersebut dipotret sebagai potongan-potongan aspek yang menyerupai warisan Orde Baru. Oleh karena kendala, penelitian ini mengakui bahwa itu tidak memotret faktor-faktor yang tersebut dengan setiap aspek lengkap, tetapi penelitian ini diharapkan memberikan sebuah wawasan pada pemikiran dan perasaan masyarakat Bandung dan Yogyakarta terhadap situasi politik, dan memberikan kesempatan untuk penelitian lebih lanjut.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan saran dan masukan yang berharga demi kesempurnaan penulisan pada masa-masa yang akan datang.

V. Daftar Pustaka

5.1.1 Buku-buku

Anderson, B.R'O.G., 2001. *Violence and the State in Suharto's Indonesia*. Ithaca, NY: SEAP Publications.

Ricklefs, M.C., 1993. *A History of Modern Indonesia Since c.1300*. California: Stanford University Press.

Vltchek, A., 2012. *Indonesia: Archipelago of Fear*. London: Pluto Press.

Vltchek, A., and Indira, R., 2006. *Exile: In conversation with Pramoedya Ananta Toer*. Ed Nagesh Rao. Chicago: Haymarket Books.

5.1.2 Jurnal-Jurnal

Gunn, C.G., 2014. Indonesia in 2013: Oligarchs, Political Tribes and Populists. In *Asian Survey* [e-journal] JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2014.54.1.47> [Accessed 28/03/2015]

Newberg, P.R, and Carothers, T., 1996. Aiding – and Defining Democracy. In *World Policy Journal*. [e-journal] Available through: JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/40209465> [Accessed 19/03/2015]

Newman, N., 2012. Indonesia: Telling Lies. In *World Policy Journal*. Vol. 28, No. 4. [e-journal] JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/41479308> [Accessed 19/02/2015]

Rieffel, L., 2004. Indonesia's Quiet Revolution. In *Foreign Affairs*. Vol. 83. No. 5 [e-journal] JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/20034070> [Accessed 28/03/2015]

Salvemini, G., 1935. What is Freedom? In *Annals of the American Academy of Political Science*, [e-journal] vol. 180, JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/1019175> [Accessed 20/03/2015]

Snape, F., 1999. Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia. [e-journal] Vol 20. No. 3, Third World Quarterly. JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/3993323> [Accessed 23/02/2015]

Steele, J., 2012. The Making of the 1999 Indonesian Press Law. In *Indonesia*. No. 94 [e-journal] <http://www.jstor.org/stable/10.5728/indonesia.94.0001> [Accessed 19/03/2015]

Suryadinata, L., 1999. A Year of Upheaval and Uncertainty: The Fall of Suharto and Rise of Habibie. In *South East Asian Affairs*. JSTOR: <http://www.jstor.org/stable/27912223> [Accessed 24/02/2015]

Wieringa, S., 2003. The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism. In *Journal of Women's History*. [e-journal] vol. 15, No. 1. Project MUSE: <http://muse.jhu.edu/journals/jowh/summary/v015/15.1wieringa.html> [Accessed 05/01/2015]

5.1.3 Online

- Definisi 1.1. Oxford Dictionaries. [online].
<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/elite> [Accessed 02/02/2015]
- Denny, C., 2004. Suharto, Marcos and Mobutu head corruption table with \$50bn scams. [online] *The Guardian*.
<http://www.theguardian.com/world/2004/mar/26/indonesia.philippines> [Accessed 24/04/2015]
- Draper, B and Brown, J., 2015. Gov.UK. <https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/winston-churchill> [Accessed 21/03/2015]
- Freedom House., 2015. Individual Country Ratings and Status 1973-2015. [online] Available through: <https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.VT9Sf5NKWVw> [Accessed 20/02/2015]
- Freedom House., 2015. [online] Available at: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/indonesia#.VV18OEZKWWv> [Accessed 03/03/2015]
- Hobley, M., 2012. Public Opinion can make a Positive Role in Policy Making. *The Guardian*. [online] <http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2012/sep/03/public-opinion-influence-policy> [Accessed 21/03/2015]
- Indonesia-Investments. 2015. [online] Available through: <http://www.indonesia-investments.com/business/risks/corruption/item235> [Accessed 12/04/2015]
- Jakarta Post., 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/08/corruption-cases-rise-abuse-political-power.html> [Accessed 02/03/2015]
- Marhaenjanti, B., 2013. Court Wilts Under Attack from Pemuda Pancasila Thugs. [online] *Jakarta Globe*. Available at: <http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/court-wilts-under-attack-from-pemuda-pancasila-thugs/> [Accessed 06/03/2015]
- Sundari., 2012. House: "Indonesia Should Freeze Pemuda Pancasila and Forum Betawi Rembug's Activities." [online] *Tempo*.
<http://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/02/055414309/house-indonesia-should-freeze-pemuda-pancasila-and-forum-betawi-rembugs-activities> [Accessed 05/03/2015]
- Törnquist. O., 2008. How far to meaningful democracy II? *Inside Indonesia*: [online] Available at: <http://www.insideindonesia.org/how-far-to-meaningful-democracy-2> [Accessed 27/03/2015]
- Transparency International., 2015. [online] Available at:
http://www.transparency.org/whatwedo?gclid=CKGslby7_sQCFRUXjgodHawAvQ [Accessed 20/03/2015]
- Transparency International., 2015. [online] Available through:
http://www.transparency.org/whatwedo?gclid=CKGslby7_sQCFRUXjgodHawAvQ [Accessed 20/03/2015]

Transparency International., 2015. Corruption Perception Index 1997. [online] Available at: https://www.transparency.org/files/content/tool/1997_CPI_EN.pdf [Accessed 02/03/2015]

Transparency International., 2015. Corruption Perceptions Index 2014: Results. Available at: <http://www.transparency.org/cpi2014/results> [Accessed 05/01/2015]

5.1.4 Sumber

Diskusi dengan seorang yang ingin tanpa nama, Jakarta: 22/08/2014

Diskusi dengan Andre Vltchek, Yogyakarta: 05/11/2014

Diskusi sambil makan siang di Phoenix Hotel, Yogyakarta dengan Andre

Vltchek 05/11/2014

Diskusi korupsi dengan Pricylia Wulandari, Yogyakarta., 13/03/2015

Diskusi dengan Ani Sartika, STMM (Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta)
20/03/2015 18:00

Diskusi dengan anggota-anggota Pemuda Pancasila, Sleman, Yogyakarta.,
30/03/2015

Wawancara anggota Pemuda Pancasila di Sleman, Yogyakarta., 30/03/2015.

Diskusi dengan Abriani Ratnasari online setelah survey, 05/04/2015.

Diskusi dengan Karen Laurencia, UNPAR, Bandung., 23/04/2015.

Diskusi di Bandung, 23/04/2015 – 26/04/2015

Diskusi dengan Tiara Juliana, Bandung: 23/04/2015 20:30

Diskusi masa reformasi dengan penjaga Pak Iwan, Bandung, 24/04/2015

Diskusi dengan Nius Pranantha, UGM Yogyakarta. 26/04/2015 15:11

Diskusi di Yogyakarta, 26/04/2015

Wawancara, Arif Rokhman, UGM: Yogyakarta, 27/04/2015

Pernyataan M. Fiqi Ari Latif, UGM Yogyakarta yang ditulis dalam survey

5.1.5 Lain

Catatan Kuliah: Perubahan Rezim. SOAS, 2012. Mark Laffey